

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kabupaten Pinrang
2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PINRANG**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kabupaten Pinrang
2020



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PINRANG TAHUN 2020

Nomor Publikasi : 73150.2024
Katalog : 4102004.7315
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman : vi + 93 halamann
Naskah : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang

Tim Penyusun Naskah

Penanggung Jawab : H. Muhammad Asri Lantong, S.E.
Koordinator : Sunarti, S.Si.
Anggota : Ekwindi Linggar Surya Kusuma, S.Si.

Penyunting : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Gambar Kover : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Penerbit : © Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang
Pencetak : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang
Sumber Ilustrasi : Desa Lotang Salo, Suppa; www.canva.com ;
www.cleanpng.com

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan
komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Kabupaten Pinrang tahun 2020 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang yang memuat berbagai indikator antara lain, indikator kependudukan, keluarga berencana (KB), pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan indikator-indikator lainnya. Data yang digunakan bersumber dari BPS maupun organisasi Pemerintah Daerah. Data BPS yang digunakan bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Proyeksi Penduduk Indonesia, dan lainnya.

Publikasi ini merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen BPS akan data yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat di wilayah Kabupaten Pinrang tahun 2019. Selain itu, diharapkan publikasi ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pembangunan daerah, khususnya di bidang sosial. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan. Terima kasih kepada pihak yang membantu terbitnya publikasi ini. Saran dan kritik sangat kami harapkan.

Pinrang, Desember 2020
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Pinrang



H. Muhammad Asri Lantong, S.E
NIP. 19661121 199301 1 001

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://pinrangkab.bps.go.id>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
PENDAHULUAN	3
KEPENDUDUKAN	9
KESEHATAN DAN GIZI	21
P E N D I D I K A N	35
KETENAGAKERJAAN	49
TARAF DAN POLA KONSUMSI	63
PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN	71
KEMISKINAN	79
SOSIAL LAINNYA	87
DAFTAR PUSTAKA	93

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://pinrangkab.bps.go.id>

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

merupakan indikator sosial ekonomi yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tingkat keberhasilan pembangunan

RUANG LINGKUP

Kependudukan

Taraf dan Pola Konsumsi

Kesehatan dan Gizi

Perumahan dan Lingkungan

Pendidikan

Kemiskinan

Ketenagakerjaan

Sosial Lainnya

Sumber Data :

Susenas

Sakernas

**Proyeksi
Penduduk**

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://pinrangkab.bps.go.id>

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan mempunyai makna yang luas, tidak hanya terkait dengan terpenuhinya kebutuhan seperti sandang, pangan dan papan tetapi juga menyangkut pemenuhan aspek kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup bahkan rasa aman. Oleh karena itu, indikator pertumbuhan ekonomi atau pendapatan perkapita saja tidak cukup untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Diperlukan indikator-indikator lain seperti banyaknya penduduk yang bersekolah, tingkat kesehatan masyarakat, dan tingkat kemiskinan untuk mendapatkan gambaran kesejahteraan secara umum.

Ketersediaan data-data terkait sosial dan ekonomi sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan pembangunan telah dicapai pemerintah suatu daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) diberi amanat oleh undang-undang untuk melaksanakan kegiatan statistik dasar. Statistik dasar adalah menyediakan data-data sosial maupun ekonomi melalui berbagai survei dan sensus. Hasil dari kegiatan tersebut kemudian dibukukan menjadi beragam publikasi, salah satunya Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra).

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat menyajikan berbagai indikator dasar yang terkait dengan kependudukan, keluarga berencana (KB), pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan dan pengeluaran konsumsi. Data-data yang ditampilkan merupakan hasil dari survei-survei BPS, diantaranya Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2019 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2019.

Publikasi ini diterbitkan sebagai upaya mengantisipasi berbagai kebutuhan data tentang kesejahteraan rakyat di Kabupaten Pinrang, yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Data yang disajikan dalam publikasi ini dipilih sedemikian rupa sehingga dapat menggambarkan taraf hidup dan perkembangan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Pinrang.

1.1 Ruang Lingkup

Publikasi ini secara umum menjelaskan indikator kesejahteraan rakyat di Kabupaten Pinrang tahun 2019. Namun demikian untuk beberapa indikator disajikan menurut kategori tertentu dan untuk mengetahui perkembangannya dilakukan perbandingan dengan menampilkan data pada beberapa tahun sebelumnya.

1.2 Sumber Data

Sumber data utama untuk penyusunan publikasi ini berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret tahun 2019 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Agustus tahun 2019. Diantara beberapa survei yang dilaksanakan oleh BPS, Susenas merupakan survei dengan cakupan data sosial, ekonomi, dan kependudukan yang paling luas. Indikator yang terkumpul dari hasil Susenas antara lain meliputi bidang pendidikan, partisipasi keluarga berencana (KB), kesehatan, perumahan, dan pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Data Susenas dan Sakernas berpotensi menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dengan adanya ilustrasi mengenai keadaan berbagai komponen sosial yang dapat diketahui dengan menyusun data berupa indikator tingkat partisipasi sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja, persentase peserta KB aktif, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air bersih, dan juga rata-rata pengeluaran perkapita sebulan untuk konsumsi makanan dan non makanan.

1.3 Sistematika Penulisan

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pinrang 2020 disusun dalam sembilan bab. Bab satu sebagai pendahuluan yang mencakup ruang lingkup penulisan, sumber data, dan sistematika penulisan. Bab dua membahas tentang kependudukan, yaitu mengenai jumlah penduduk, rasio jenis kelamin, laju pertumbuhan penduduk, sebaran dan

kepadatan penduduk, komposisi umur dan jenis kelamin, serta angka beban ketergantungan.

Pada bab ketiga akan dibahas mengenai kesehatan dan gizi, pemanfaatan fasilitas kesehatan yang ada, dan tempat tujuan berobat jalan. Selanjutnya pada bab empat dibahas mengenai kondisi pendidikan yang mencakup angka melek huruf, partisipasi sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan juga rasio murid-guru serta rasio murid-sekolah.

Kemudian pada bab kelima menyajikan kondisi ketenagakerjaan yang mencakup partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, lama jam kerja, serta lapangan usaha utama bagi penduduk yang bekerja. Taraf dan pola konsumsi yang mencakup rata-rata pengeluaran untuk bahan makanan dan non makanan, rata-rata konsumsi energi dan protein akan dibahas pada bab enam.

Tingkat sosial yang berkaitan dengan kondisi perumahan dan penguasaan tempat tinggal disajikan dalam bab tujuh. Pokok bahasan yang ada pada bab tujuh antara lain mengenai kualitas rumah tempat tinggal, fasilitas perumahan, dan status kepemilikan rumah. Pada bab delapan akan disajikan mengenai kondisi ekonomi rumah tangga dengan cakupan pengeluaran konsumsi rumah tangga serta kondisi penduduk miskin. Dan bab terakhir yaitu bab sembilan akan membahas mengenai indikator sosial lainnya seperti penguasaan komputer dan telepon genggam, serta penggunaan internet.

Semua indikator tersebut akan diulas serta dilengkapi dengan tabel dan grafik sehingga memudahkan para konsumen data dalam memahami kondisi sosial ekonomi yang ada di Kabupaten Pinrang.

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://pinrangkab.bps.go.id>

KEPENDUDUKAN



Jumlah Penduduk :

377.119

Jiwa

Laju Pertumbuhan
Penduduk :

0,68



Rasio Jenis Kelamin :

94,40 Persen

" Dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 94 sampai 95 penduduk laki-laki "

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://pinrangkab.bps.go.id>

KEPENDUDUKAN

Penduduk merupakan subjek sekaligus objek dalam pembangunan. Artinya, penduduk merupakan pelaku dan penggerak pembangunan. Disisi lain, hasil dari pembangunan harus mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk. Karena hakikat dari pembangunan adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari pemerataan kesejahteraan rakyatnya. Dalam mekanisme perencanaan pembangunan, penduduk dilihat sebagai salah satu faktor strategis karena disadari posisi mereka bukan hanya sebagai sasaran tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan.

Penduduk merupakan modal dasar pembangunan. Namun di sisi lain, penduduk juga merupakan beban untuk mencapai pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah baik sosial maupun ekonomi. Jumlah penduduk yang semakin meningkat menuntut pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan produksi pangan akan mempengaruhi kualitas hidup manusia. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali juga berpotensi menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk di suatu wilayah mempengaruhi taraf kehidupan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Jika suatu wilayah memiliki jumlah penduduk yang besar sementara pendapatan regional di wilayah tersebut relatif kecil akan mengakibatkan pendapatan perkapita wilayah tersebut rendah.

Permasalahan pemenuhan kebutuhan pokok sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali serta kesejahteraan masyarakat yang rendah akan mendorong munculnya permasalahan-permasalahan sosial. Ketimpangan ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan dan kemiskinan merupakan beberapa faktor yang dapat memicu tindak kriminalitas.

Pemerintah sangat membutuhkan data jumlah penduduk dan karakteristiknya, misalnya untuk merencanakan penyediaan sarana umum, perumahan, tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan tempat rekreasi.

Sementara para pelaku bisnis memerlukan data penduduk untuk keperluan rencana produksi, pemasaran, dan rekrutmen pekerja/ karyawan. Dilain pihak, bagi lembaga swasta nonprofit data ini sangat dibutuhkan untuk bahan analisis suatu masalah tertentu. Aspek kependudukan yang disajikan dalam bab ini meliputi jumlah dan pertumbuhan penduduk, sebaran dan kepadatan penduduk, komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin serta status perkawinan penduduk.

Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin

Sejak abad ke tujuh belas, hubungan manusia dengan pembangunan selalu menjadi perdebatan. Sekelompok pakar berpendapat bahwa Penduduk mendukung pembangunan. Ada juga kelompok pakar yang justru berpendapat bahwa penduduk menghambat pembangunan. Sebagian yang lain menyatakan bahwa penduduk tidak mempunyai pengaruh terhadap pembangunan.

Pada kenyataannya, jumlah dan pertumbuhan penduduk akan sangat berpengaruh pada proses pembangunan. Kondisi kependudukan Sulawesi Selatan pada umumnya dan Kabupaten Pinrang pada khususnya yang masih dalam jumlah besar dan pertumbuhan yang tinggi secara tidak langsung berpengaruh pada pembangunan.

Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, berarti pemerintah juga harus terus menambah jumlah fasilitas hidup layak bagi masyarakatnya. Dua fasilitas yang paling mendasar adalah fasilitas pendidikan dan kesehatan. Karena dua hal tersebut akan menentukan kualitas manusia seutuhnya.

Dengan mengetahui rasio jenis kelamin, akan dapat diidentifikasi komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Informasi ini digunakan untuk perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Dahulu, karena adat dan kebiasaan, pendidikan laki-laki lebih diutamakan daripada pendidikan perempuan. Oleh karena itu, di masa sekarang, pengembangan pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui jumlah laki-laki

dan perempuan di kelompok umur yang sama. Selain itu, informasi mengenai rasio jenis kelamin juga penting diketahui dalam dunia politik terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk pada tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Pinrang tercatat sebesar 377.119 jiwa dengan rincian laki-laki 183.129 jiwa dan perempuan 193.990 jiwa. Rasio jenis kelamin 94,40 dapat diartikan bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 94 sampai 95 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, penduduk laki-laki Kabupaten Pinrang lebih sedikit jika dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Tabel 1. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan, dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Pinrang 2015-2019

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	366.789	0,74	94,11
2016	369.595	0,77	94,24
2017	372.230	0,71	94,23
2018	374.583	0,63	94,31
2019	377.119	0,68	94,40

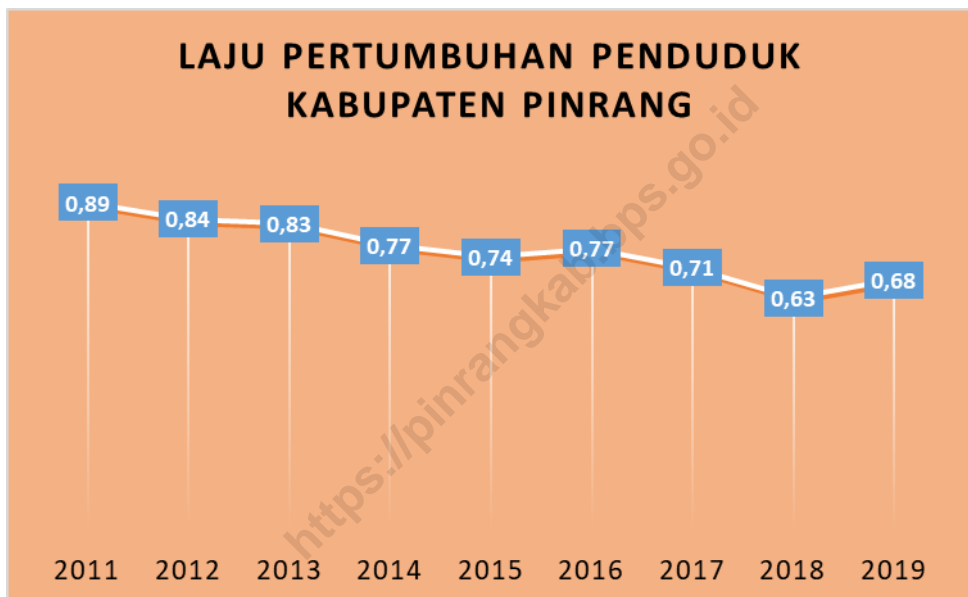
Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten Pinrang 2010 – 2020

Pertumbuhan penduduk adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial ekonomi di suatu daerah. Indikator ini sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah pada masa yang akan datang. Dengan diketahuinya jumlah penduduk yang akan datang, dapat diketahui pula kebutuhan dasar penduduk di wilayah tersebut di berbagai bidang. Akan tetapi, prediksi jumlah penduduk masih harus dilengkapi dengan berbagai macam karakteristik penduduknya agar dapat dipergunakan secara tepat sasaran.

Pertumbuhan penduduk yang kurang terkendali akan menimbulkan berbagai masalah baik pengangguran, kemiskinan, tingkat kualitas SDM, kejahatan, lapangan pekerjaan dan sebagainya. Hal ini bisa saja

memberikan dampak negatif pada upaya peningkatan kualitas SDM. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah penduduk yang besar juga merupakan modal dan aset pembangunan.

Laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi akan membawa dampak terhadap pembangunan, termasuk dalam penentuan kebijakan kependudukan. Dengan jumlah penduduk yang relatif tinggi, penentuan kebijakan harus mempertimbangkan banyak hal. Seperti misalnya, penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang implementasi kebijakan bidang kependudukan tersebut.



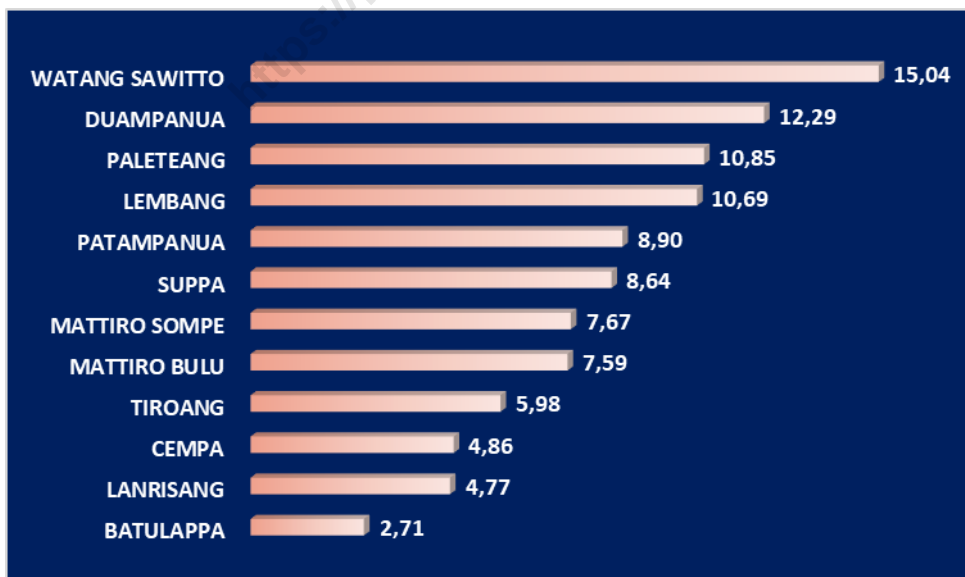
Grafik 1. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pinrang, 2011-2019

Selama tahun 2011-2019 laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Pinrang tidak selalu mengalami penurunan, seperti pada tahun 2016 dan 2019, laju pertumbuhan penduduk mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten pinrang sebesar 0,68 persen meningkat 0,05 persen dari tahun 2018. LPP yang kurang dari satu persen atau bahkan mendekati nol persen mengindikasikan bahwa jumlah penduduk secara tidak langsung berbanding terbalik dengan usaha dalam menjaga kualitas sumber daya manusia.

Sebaran dan Kepadatan Penduduk

Persebaran penduduk yang tidak merata merupakan permasalahan di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Pinrang. Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk berada di wilayah perkotaan. Hal ini dipicu oleh keinginan masyarakat untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Pinrang. Persebaran penduduk terpusat di ibukota kabupaten yaitu Kecamatan Watang Sawitto serta wilayah sekitarnya, seperti Paleteang dan Tiroang.

Pada tahun 2019 penduduk Kabupaten Pinrang diperkirakan berjumlah 377.119 jiwa yang tersebar di 12 Kecamatan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Lembang dengan luas wilayah 37,37 persen dari total luas wilayah Kabupaten Pinrang dengan jumlah penduduk adalah 10,69 persen dari total penduduk Kabupaten Pinrang. Sedangkan untuk kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Paleteang dengan luas wilayah 1,90 persen dari total luas wilayah Kabupaten Pinrang. Namun demikian jumlah penduduk di Kecamatan Paleteang adalah 10,85 persen dari total penduduk Kabupaten Pinrang.



Grafik 2. Kepadatan Penduduk Kabupaten Pinrang menurut Kecamatan, 2019

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Pinrang juga mengalami peningkatan. Tahun 2019, kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Pinrang adalah 192 jiwa per km². Angka ini menunjukkan bahwa terdapat sekitar 192 jiwa di tiap km luas wilayah Kabupaten Pinrang. Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Lembang. Meskipun merupakan kecamatan yang terluas dan memiliki potensi perkebunan, namun secara geografis Kecamatan Lembang terdiri atas daerah pegunungan dengan infrastruktur yang belum memadai, sehingga banyak penduduk yang memilih menetap di daerah lain dibandingkan Lembang.

Tabel 2. Kepadatan Penduduk Kabupaten Pinrang menurut Kecamatan Tahun 2018-2019

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	2018		2019	
		Penduduk	Kepadatan (Jiwa/km ²)	Penduduk	Kepadatan (Jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Suppa	74,2	32.362	436	32.580	439
Mattiro Sompe	96,99	28.718	296	28.911	298
Lanrisang	73,01	17.885	245	18.004	247
Mattiro Bulu	132,49	28.429	215	28.620	216
Watang Sawitto	58,97	56.329	955	56.713	962
Paleteang	37,29	40.655	1090	40.934	1098
Tiroang	77,73	22.410	288	22.561	290
Patampanua	136,85	33.336	244	33.562	245
Cempa	90,3	18.213	202	18.337	203
Duampanua	291,86	46.049	158	46.358	159
Batulappa	158,99	10.161	64	10.232	64
Lembang	733,09	40.036	55	40.307	55
Pinrang	1961,77	374.583	191	377.119	192

Sumber : Kabupaten Pinrang dalam Angka, 2019-2020

Angka Beban Ketergantungan

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan tinggi/ rendahnya tingkat kelahiran. Selain itu komposisi penduduk juga mencerminkan angka beban tanggungan yaitu perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun) dengan penduduk usia tidak produktif (umur di bawah 15 tahun & 65 tahun ke atas). Penduduk Kabupaten Pinrang yang berusia 0-14 tahun pada tahun 2019 sebanyak 28,99 persen. Sedangkan penduduk yang berusia 65 tahun ke atas mencapai 7,08 persen dari seluruh penduduk Kabupaten Pinrang.

Angka Beban Ketergantungan (Dependency ratio) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk usia belum produktif dan usia tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk usia belum produktif dan usia tidak produktif lagi.

Angka Beban Ketergantungan (ABT) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun). Penduduk usia produktif disebut juga angkatan kerja yang dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebaliknya penduduk usia non produktif adalah bukan angkatan kerja yang tidak dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, ABT dapat menjadi indikator kasar kondisi ekonomi suatu wilayah.

Tabel 3. Persentase Penduduk Kabupaten Pinrang Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018-2019

Kelompok Umur	2018			2019		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-14	14,90	14,34	29,24	14,78	14,21	28,99
15-64	30,71	33,13	63,83	30,78	33,15	63,94
65+	2,93	4,00	6,93	3,00	4,07	7,08
ABT Muda	48,53	43,28	45,80	48,00	42,86	45,34
ABT Tua	9,54	12,08	10,86	9,75	12,29	11,07
ABT	58,07	55,36	56,66	57,75	55,15	56,40

Sumber : Proyeksi Penduduk 2010-2020 (diolah)

Semakin tinggi ABT, semakin tinggi pula beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, begitu juga sebaliknya. ABT Kabupaten Pinrang tahun 2019 sebesar 56,40 persen menunjukkan bahwa dari setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 56 sampai 57 penduduk usia tidak produktif. Nilai ABT Kabupaten Pinrang termasuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan tabel di atas, ABT Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 menurun dibandingkan tahun 2018. Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu peningkatan proporsi penduduk usia produktif dan penurunan proporsi penduduk usia non produktif (kelompok 0-14 tahun) pada tahun 2019. Penurunan ABT tentu menjadi tanda yang baik bagi pemerintah karena menunjukkan penurunan beban ekonomi.

Menurunnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) sebagai dampak dari menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Sementara itu, jika dilihat dari jenis kelaminnya, terlihat bahwa ABT laki-laki pada usia 0-14 tahun (ABT Muda) lebih tinggi dibandingkan perempuan, baik pada tahun 2018 maupun tahun 2019. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk laki-laki di usia muda lebih besar daripada perempuan sedangkan pada saat usia produktif cenderung menurun, baik karena migrasi maupun kematian.

Sementara itu, pada usia 65 tahun ke atas nilai ABT (ABT Tua) untuk perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan oleh usia harapan hidup perempuan yang lebih panjang daripada laki-laki.

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://pinrangkab.bps.go.id>

KESEHATAN DAN GIZI

Umur Harapan Hidup (UHH) 2019



69,39 TAHUN

"Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir didefinisikan sebagai **rata-rata** perkiraan banyak tahun yang ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan **derajat** kesehatan suatu masyarakat"

Keluhan Kesehatan

Penduduk Pinrang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan yang lalu (saat pencacahan lapangan). **16,04%**



14,99%



Penduduk wanita yang sakit lebih banyak daripada laki-laki.

17,02%

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://pinrangkab.bps.go.id>

KESEHATAN DAN GIZI

Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas.

Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat; menurunkan angka kematian ibu dan bayi; menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang; dan meningkatkan angka harapan hidup. Keberadaan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan adanya bidan di desa akan mempengaruhi masyarakat sekitarnya untuk hidup sehat. Selain itu, semua lapisan masyarakat mempunyai akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang relatif mudah, murah dan merata.

Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau. Caranya adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin, menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes, dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

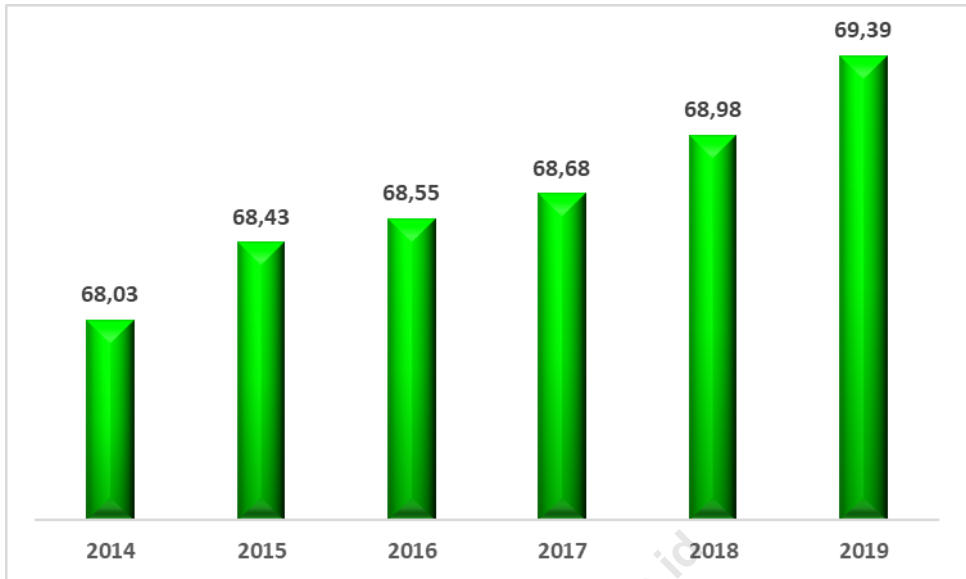
Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain: angka harapan hidup; angka kesakitan; kesehatan ibu, prevalensi balita kurang gizi; dan indikator lainnya. Berbagai indikator lainnya tersebut berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti:

persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis; persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya; serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Tingkat kesehatan di suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari Umur Harapan Hidup, selain angka kesakitan masyarakat yang merepresentasikan sejauh mana tingkat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Pinrang semakin meningkat, yang ditandai dengan peningkatan Umur Harapan Hidup, tercatat dari berumur 68,03 tahun pada tahun 2014 menjadi 69,39 tahun Pada tahun 2019. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) atau Life Expectancy (e₀) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Peningkatan Umur Harapan Hidup ini karena sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain: faktor-faktor perilaku masyarakat, lingkungan hidup, pelayanan kesehatan dan faktor keturunan. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat guna mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi perlu dijalankan antar intersektoral dengan menyertakan peran serta pemerintah, masyarakat dan swasta.



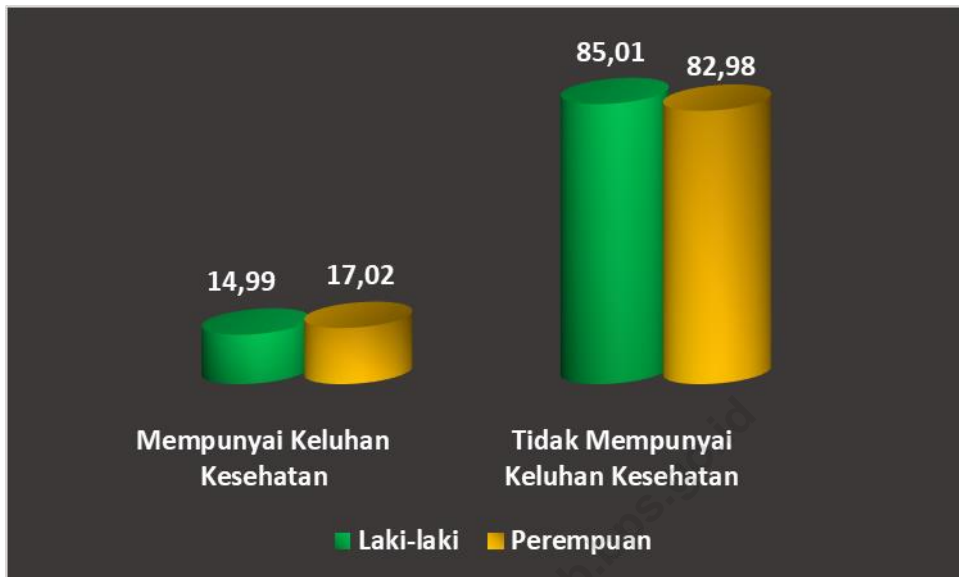
Grafik 3. Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pinrang, 2014-2019

Angka Kesakitan / Morbiditas

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), maka morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll.

Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit). Pada tahun 2019, penduduk yang mengeluh terhadap kesehatannya yaitu sebesar 16,04 persen. Meski perempuan memiliki usia harapan hidup yang lebih tinggi dari laki-laki, namun secara umum perempuan lebih sensitif terhadap rasa sakit. Kondisi ini terlihat dari series data keluhan kesehatan. Pada tahun 2019, persentase

perempuan yang mengeluh sakit sekitar 17,02 persen, sementara laki-laki sekitar 14,99 persen.



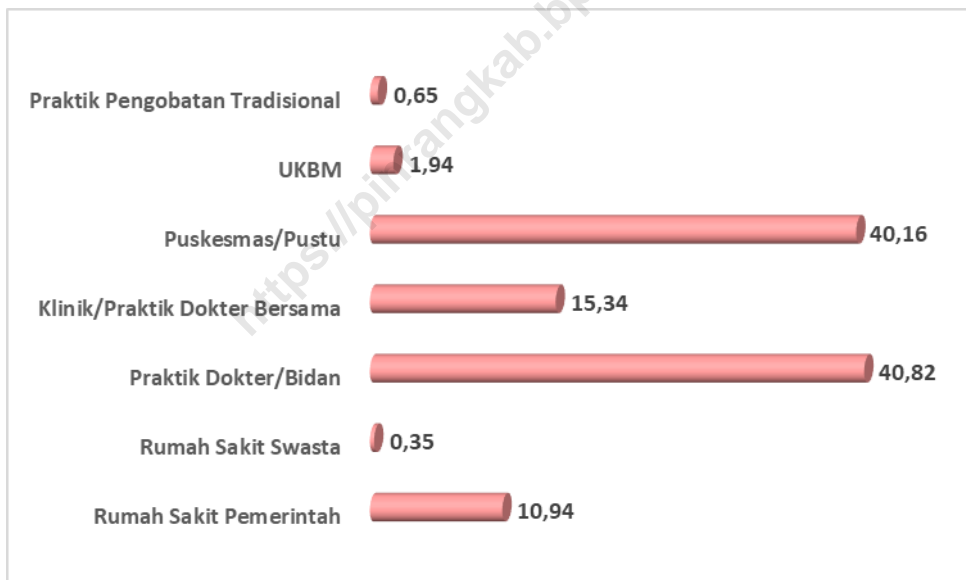
Grafik 4. Persentase penduduk menurut angka kesakitan, 2019

Sarana dan Prasarana Kesehatan

Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat terkait dengan akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk dalam akses fasilitas kesehatan adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, sosial ekonomi penduduk yaitu kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya, serta jenis pelayanan kesehatan. Dari beberapa alternative fasilitas kesehatan, ternyata puskesmas/pustu lebih diminati oleh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Ketersediaan, kemudahan akses serta biaya menjadi pendorong tingginya minat masyarakat untuk berobat di puskesmas/pustu.

Keberadaan Puskesmas sangat strategis dalam pelayanan kesehatan di pedesaan. Puskesmas adalah satu unit pelayanan fungsional yang fungsi utamanya adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama. Wilayah kerjanya meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan, yang biasanya dibangun dengan melihat kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan geografi dan infrastruktur lainnya. Penguatan puskesmas juga merupakan awal dari program kesehatan gratis yang diterapkan oleh pemerintah.

Keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan sampai daerah terpencil yang mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat termasuk yang tidak mampu tentunya sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan berupa rumah sakit biasanya berada di ibukota kabupaten/ kota, sedangkan untuk melayani masyarakat di pedesaan biasanya tersedia fasilitas pelayanan kesehatan berupa Puskesmas.



Grafik 5. Persentase tempat berobat jalan penduduk Kabupaten Pinrang yang mengalami keluhan kesehatan, 2019

Penduduk yang berobat ke pengobatan tradisional dan rumah sakit swasta merupakan yang terkecil, dimana masing-masing hanya sebesar 0,65 persen dan 0,35 persen pada tahun 2019. Fakta ini mengindikasikan semakin baiknya pemahaman penduduk tentang kesehatan. Karena pada

dasarnya, berobat ke fasilitas kesehatan lebih masuk akal dan ilmiah dibanding berobat ke pengobatan tradisional.

Ketiadaan biaya pengobatan secara tidak langsung menjadi salah satu penyebab menurunnya derajat kesehatan masyarakat. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimulai pada Januari 2014 diberlakukan bagi seluruh penduduk Indonesia tak terkecuali penduduk Kabupaten Pinrang, tujuannya mengatasi kendala biaya pengobatan. JKN yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory). Hal ini berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak.

Sampai saat ini, pelaksanaan JKN semakin direspon cukup positif oleh masyarakat. Dari data Susenas menunjukkan penduduk Kabupaten Pinrang yang tidak menggunakan jaminan kesehatan pada tahun 2019 sebesar 55,77 persen. Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan sebesar 44,23 persen penduduk, dengan jenis jaminan kesehatan yang dimiliki adalah BPJS PBI dan Non PBI, tidak ada penduduk yang menggunakan jenis jaminan kesehatan Jamkesda, Asuransi Swasta, dan Asuransi dari Perusahaan/Kantor jika berdasarkan pada Susenas 2019.

Tabel 4. Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan, jenis jaminan kesehatan Tahun 2019

BPJS PBI	Non PBI	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan /Kantor	Tidak Menggunakan
28,22	25,57	0,00	0,00	0,00	55,77

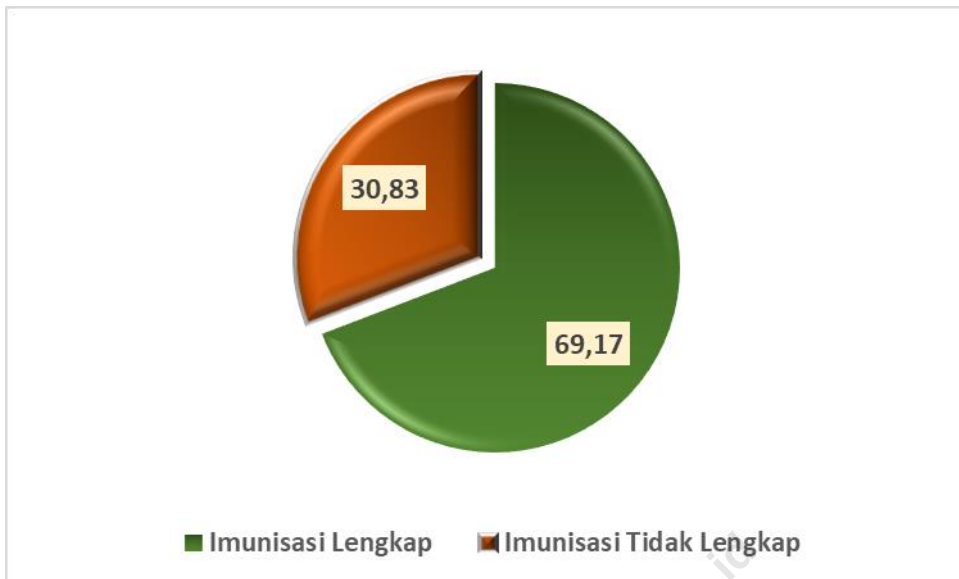
Sumber: Susenas, 2019

Kesehatan Ibu dan Bayi

Seorang ibu, memegang kunci penting dalam kehadiran penerus-penerus yang sehat dan berkualitas. Ibu yang sedang mengandung harus mulai memperhatikan asupan yang dimakannya dan juga harus melakukan imunisasi, karena hal tersebut merupakan gizi dan imunisasi awal seorang anak dimulai. Kemudian dilanjutkan setelah sang anak lahir dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI) sangat dianjurkan untuk diberikan ke pada bayi, karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. ASI memiliki manfaat sangat besar untuk jangka panjang, karena ASI adalah nutrisi terbaik dan terlengkap, mengandung protein dan zat-zat gizi berkualitas tinggi serta mengandung zat antibodi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi, dan melindungi tubuh bayi dari alergi dan diare serta penyakit infeksi lainnya. Oleh sebab itu pemerintah senantiasa mengaktualisasikan dan mensosialisasikan peningkatan penggunaan ASI bagi balita.

Pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 bulan ke depan, tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan/minuman lain. Selanjutnya setelah bayi berusia 6 bulan ke atas dilanjutkan bersama dengan makanan tambahan dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun. Hasil Susenas 2019 menunjukkan bahwa di Kabupaten Pinrang, bayi yang mendapatkan ASI eksklusif (selama 6 bulan) sebesar 96,5 persen dan yang mendapatkan ASI eksklusif (kurang dari 6 bulan) sebesar 3,5 persen.

Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Walaupun ada sebagian pihak yang masih belum sadar akan pentingnya imunisasi, tetapi imunisasi telah terbukti dapat meningkatkan kekebalan terhadap jenis penyakit tertentu. Imunisasi merupakan program pencegahan, sebagai benteng untuk menangkal suatu jenis penyakit tertentu.



Grafik 6. Persentase balita menurut Imunisasi Lengkap 1-3-3-1-3, 2019

Tabel 5. Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Pernah Mendapat Imunisasi menurut Karakteristik dan Jenis Imunisasi, 2019

Karakteristik	Jenis Imunisasi				
	BCG	DPT	Polio	Campak/ Morbili	Hepatitis B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jenis Kelamin					
Laki-laki	92,06	85,09	92,06	73,20	92,57
Perempuan	93,94	91,37	93,07	88,00	93,88
Kabupaten Pinrang	92,98	88,16	92,55	80,43	93,21

Sumber: Susenas, 2019

Jenis imunisasi ada dua macam yaitu imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir dan imunisasi aktif dimana kekebalan didapat dari pemberian vaksin kepada anak melalui suntik atau tetes. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi

dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang disekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili dan Hepatitis. Berdasarkan hasil Susenas 2019, cakupan imunisasi dasar lengkap dengan kata lain, imunisasi wajib pada bayi di Kabupaten Pinrang sudah mencapai 69,17 persen bayi.

Selain pemenuhan ASI bagi balita, program kecukupan gizi juga sangat penting bagi balita, karena kekurangan gizi pada balita akan mempengaruhi kecerdasan dan pertumbuhan anak. Status gizi secara tidak langsung bisa menggambarkan kualitas kehidupan. Kecukupan gizi tidak hanya tentang pemenuhan makanan, namun juga tentang kualitas dan kuantitas dari makanan itu sendiri haruslah tepat. Makanan tidak hanya perlu sehat dan beraneka ragam namun juga harus bersih dan sesuai dengan porsinya. Tetapi yang perlu diingat juga adalah bahwa gizi berlebih pada balita juga dianggap tidak baik karena dapat memicu obesitas yang dapat menimbulkan resiko timbulnya penyakit. Jika anak mengalamiambat tumbuh, menyebabkan kondisi yang kita kenal dengan istilah stunting.

Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Penolong persalinan sangat berpengaruh terhadap keselamatan serta kesehatan bayi dan ibu pada saat proses persalinan. Penolong persalinan yang berkualitas tentunya lebih memungkinkan terwujudnya keselamatan dan kesehatan bayi serta ibu pada saat persalinan. Tenaga medis sebagai penolong persalinan tentunya lebih baik dibanding tenaga non medis. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan barometer pelayanan kesehatan di suatu wilayah. AKI dan AKB erat kaitannya dengan ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, dalam upaya menurunkan AKI dan AKB, Indonesia menerapkan program *safe motherhood* dengan pilar utamanya adalah persalinan aman yang ditolong oleh tenaga kesehatan.

Pada pengumpulan data Susenas, diperoleh informasi tentang penolong kelahiran pertama dan penolong kelahiran terakhir. Penolong kelahiran pertama adalah orang yang membantu proses persalinan pertama

kali. Sedangkan penolong kelahiran terakhir adalah orang yang membantu proses persalinan hingga bayi dilahirkan. Penolong persalinan pertama dan terakhir dapat berbeda jika penolong kelahiran pertama menemukan masalah dalam persalinan yang tidak dapat ditangani sehingga membutuhkan bantuan untuk penanganan lebih lanjut dalam menangani proses persalinan. Oleh sebab itu, pada umumnya penolong terakhir memiliki kemampuan dalam penanganan persalinan yang lebih baik dibandingkan penolong pertama.

Informasi mengenai penolong kelahiran diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pelayanan kesehatan telah menjangkau masyarakat. Standar pelayanan minimal kesehatan mensyaratkan 90 persen pertolongan persalinan dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi kebidanan.

Usaha pemerintah dalam menyediakan tenaga kesehatan ternyata memperlihatkan hasil yang signifikan, dimana persentase balita yang penolong proses kelahiran terakhirnya adalah tenaga kesehatan meningkat dari 96,84 persen pada tahun 2018 menjadi 100 persen pada tahun 2019. Artinya, dari 10 kelahiran bayi keseluruhan ditolong oleh tenaga kesehatan.

Kenaikan tersebut disebabkan adanya peningkatan peran bidan dan dokter kandungan sebagai penolong persalinan. Persentase bayi yang kelahirannya ditolong oleh bidan sebesar 69,17 persen, oleh Dokter sebesar 29,53 persen, dan sisanya sebesar 1,3 persen ditolong oleh tenaga medis lain. Jika melihat jumlah tenaga kesehatan, jumlah bidan lebih banyak dibanding dokter. Selain itu, banyak daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh dokter. Untuk daerah tersebut, bidan berperan sebagai pengganti dokter. Selain bidan lebih dekat dengan masyarakat, biaya melahirkan dibidan diduga lebih hemat dibanding melahirkan dibantu oleh dokter. Bahkan di beberapa daerah, kadang dokter akan turun tangan membantu untuk persalinan yang tidak normal atau beresiko tinggi. Dalam hal ini, bidan merupakan pertolongan pertama untuk meminimalisir resiko kematian ibu melahirkan. Bidan berada di barisan terdepan untuk membantu ibu melahirkan dalam upaya menurunkan angka kematian ibu melahirkan.

Tabel 6. Persentase balita menurut penolong kelahiran terakhir, 2019

Dokter	Bidan	Tenaga Medis Lain	Dukun	Lainnya	Tidak Ada
29,53	69,17	1,3	0,00	0,00	0,00

Sumber: Susenas, 2019

Perhatian pemerintah pada tenaga penolong persalinan sudah cukup baik karena apabila penolong persalinan bukanlah tenaga kesehatan maka akan memiliki resiko buruk terhadap tingginya tingkat kematian ibu dan anak yang biasanya dilakukan oleh tenaga yang belum terlatih seperti famili/keluarga yang bukan merupakan tenaga medis. Dukun tradisional, meskipun bukan tenaga medis, tetap dirangkul oleh pemerintah, karena perannya yang tidak bisa dikesampingkan, utamanya pada daerah yang tidak terjangkau tenaga medis. Upaya pemerintah adalah membekali dukun persalinan dengan ilmu kesehatan oleh bidan-bidan desa.

Ketersediaan akses dan sarana pelayanan dalam bentuk fasilitas persalinan, merupakan pelengkap penyelenggaraan kesehatan. Adanya fasilitas kesehatan akan memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, sehingga derajat kesehatan masyarakat meningkat. Perluasan akses fasilitas kesehatan diikuti dengan peningkatan penggunaan fasilitas kesehatan untuk menunjang persalinan di Kabupaten Pinrang. Penggunaan Rumah Sakit, Puskesmas, Praktek Tenaga Kesehatan, dan Polindes mengalami peningkatan. Fenomena ini menunjukkan kecenderungan masyarakat untuk memilih fasilitas kesehatan yang lebih aman dan nyaman.

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://pinrangkab.bps.go.id>

PENDIDIKAN



95,32%

Penduduk Pinrang Usia 15 tahun ke atas mampu membaca dan menulis huruf latin.

Penduduk Pinrang Usia 5 Tahun ke Atas menurut Status Pendidikan



SD/Sederajat :
14,05%



Tidak/Belum

Pernah Sekolah : **5,90%**



SMP/Sederajat :
5,39%

SMA/Sederajat :
7,07%



Tidak Bersekolah
Lagi : **67,58%**

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://pinrangkab.bps.go.id>

P E N D I D I K A N

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, Keterampilan, dan kebiasaan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan itu berfungsi mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Pada umumnya pendidikan yang tinggi akan memperbesar peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang memiliki penghasilan lebih tinggi. Ijazah pendidikan yang tinggi sebenarnya tidak menentukan kesuksesan seseorang dikemudian hari, namun kegigihan pada apa yang dipelajari selama masa pendidikan itulah yang memberi bekal dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Maka disinilah letak peran penting pendidikan yang sesungguhnya.

Pendidikan juga berfungsi untuk meningkatkan kelas sosial. Sekolah menjadi saluran mobilitas masyarakat menuju status sosial yang lebih tinggi. Karena dengan pengetahuan dan keterampilan yang lebih, seseorang akan lebih dihargai di masyarakat sekaligus menunjukkan kemampuan secara ekonomi untuk mencapai tingkat pendidikan yang tinggi.

Pendidikan menjadi kunci utama bagi kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa. Penyebab mendasar terjadinya keterbelakangan adalah kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan yang rendah di suatu wilayah akan menghambat peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, politik dan kultural secara lebih efektif (Sen, 1999). Oleh sebab itu, pembangunan manusia dalam bidang pendidikan perlu ditingkatkan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan bermartabat.

Pendidikan juga menjadi salah satu tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDG's). Tercantum dalam tujuan ke - 4 yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Tujuan ke-4 ini dibentuk dengan harapan untuk menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang. Pendidikan berkualitas merupakan prinsip dasar pembangunan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi.

Menyadari pentingnya pendidikan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa yang bermartabat, maka dalam pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya untuk meraih tujuan ini ditempuh dengan membentuk berbagai macam program pendidikan, seperti wajib belajar sembilan tahun, program kejar paket A, paket B, paket C, dan sebagainya. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan pada masa mendatang pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik sehingga kesejahteraan rakyat secara menyeluruh dapat terwujud.

Namun pada kenyataannya, masih jauh dari angan-angan dan harapan. Masih banyak permasalahan hadir di dunia pendidikan meskipun berbagai program pendidikan telah dijalankan. Kenaikan beberapa indikator seperti Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) berjalan lambat. Pendidikan bukanlah barang instan dalam mencapainya. Melainkan proyek jangka panjang yang bahkan akan terus berlangsung selama negara ini berdiri. Sehingga konsistensi dalam terus melakukan perbaikan sangat diperlukan. Mulai dari kualitas pendidik, sistem pendidikan, kurikulum yang digunakan, siswa, birokrasi pendidikan, penggunaan anggaran, hingga segala hal yang terkait dengan proses mendidik. Karena tidak ada negara maju yang tidak memperhatikan pendidikannya.

Harapan Lama Sekolah (HLS) / Expected Years of Schooling (EYS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) atau Expected Years of Schooling (EYS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar sejak usia 7 tahun. Untuk mengakomodasi penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren yaitu dari Direktorat Pendidikan Islam.

HLS Kabupaten Pinrang tahun 2019 sebesar 13,22 tahun. Artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2019 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,22 tahun atau setara dengan Diploma I/II. HLS Kabupaten Pinrang tahun 2019 meningkat sebesar 0,02 dari tahun 2018 yaitu sebesar 13,20 tahun.

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) / Mean Years of Schooling (MYS)

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) atau Mean Years of Schooling (MYS) didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka ini berguna untuk melihat kualitas penduduk di wilayah tertentu dari sisi pencapaian dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lama sekolah, semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP lama sekolah 9 tahun, tamat SMA lama sekolah 12 tahun, tanpa memperhitungkan pernah tinggal kelas atau tidak.

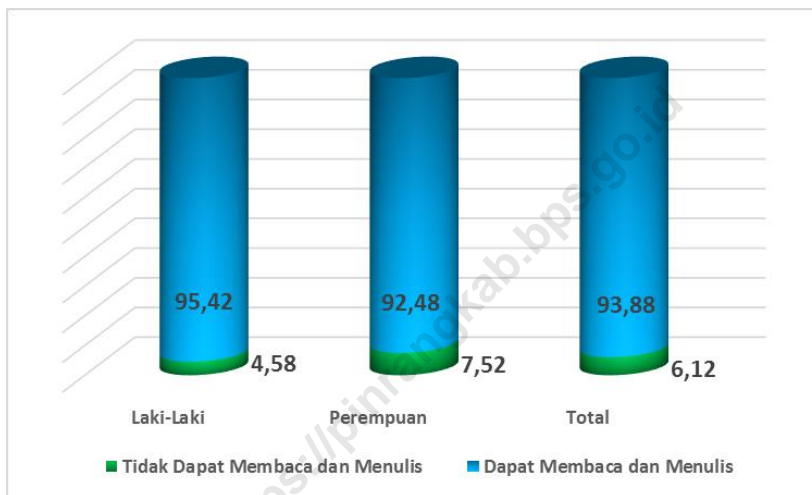
Salah satu upaya pemerintah yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada RLS adalah meningkatkan akses dan daya saing pendidikan tinggi. Terutama untuk jenjang pascasarjana yang memiliki peluang besar untuk penduduk usia di atas 25 tahun.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pinrang tahun 2019 mencapai 7,85 tahun artinya secara rata-rata penduduk Kabupaten Pinrang yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,85 tahun atau baru saja menamatkan SMP kelas 1 atau kelas 2.

Angka Melek Huruf (AMH)

Tujuan nasional pendidikan adalah memberantas buta huruf. Indikator keberhasilannya adalah menurunnya angka buta huruf atau dengan kata lain meningkatnya angka melek huruf. Definisi melek huruf adalah kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin maupun huruf lainnya tanpa harus mengerti apa yang dibaca atau ditulis.

Indikator Angka Melek Huruf (AMH) menunjukkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin dan atau huruf lainnya terhadap keseluruhan penduduk usia 15 tahun ke atas. Kemampuan membaca dan menulis merupakan indikator dasar untuk mengukur tingkat pendidikan di suatu wilayah karena membaca dan menulis merupakan dasar utama untuk memperluas pengetahuan. AMH juga menjadi tolok ukur keberhasilan program pengentasan buta huruf yang digalakkan pemerintah, baik pusat maupun daerah.



Grafik 7. Angka Melek Huruf (AMH) menurut jenis kelamin di Kabupaten Pinrang, 2019

Secara umum AMH Kabupaten Pinrang tahun 2019 (93,88 persen) meningkat dibandingkan tahun 2018 (92,79 persen) sebesar 1,09 persen. Hal ini menunjukkan pemberantasan buta huruf mengalami peningkatan. Sementara itu, berdasarkan jenis kelaminnya, AMH laki-laki (95,42 persen) lebih besar daripada perempuan (92,48 persen). Hal ini mengindikasikan bahwa proporsi laki-laki yang melek huruf lebih tinggi dibandingkan proporsi perempuan melek huruf.

Tabel 7. Angka Buta Huruf (ABH) Penduduk 15 Tahun ke atas Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang Tahun 2019

Jenis Kelamin	Kelompok Umur		
	15-24	25-59	60+
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki	0,00	3,20	18,60
Perempuan	0,75	3,87	29,60
Total	0,37	3,56	24,88

Sumber: Susenas 2019

Tabel 7 menyajikan angka buta aksara menurut kelompok remaja (15-24 tahun), kelompok dewasa (25-59 tahun) dan kelompok lansia (60 tahun ke atas), di Kabupaten Pinrang tahun 2019. Sebaran buta aksara pada penduduk 15 tahun ke atas sebagian besar berada pada kelompok usia 60 tahun keatas atau pada kelompok lansia. Sebesar 24,88 persen penduduk lansia tergolong sebagai buta aksara. Sedangkan untuk kelompok usia dewasa (25-59) tahun terdapat 3,56 persen penduduk yang masih belum bisa baca tulis, dan untuk kelompok usia remaja (15-24) tahun, sebesar 0,37 persen yang buta aksara.

Dilihat dari sisi gender, pada semua kelompok usia, buta huruf untuk perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Program pengentasan buta aksara mungkin telah berhasil pada kelompok usia remaja (15-24) tahun. Terlihat dari persentase penduduk buta aksara yang sangat kecil, hampir mencapai 0 persen. Akan tetapi, secara umum, buta huruf untuk perempuan masih tetap tinggi.

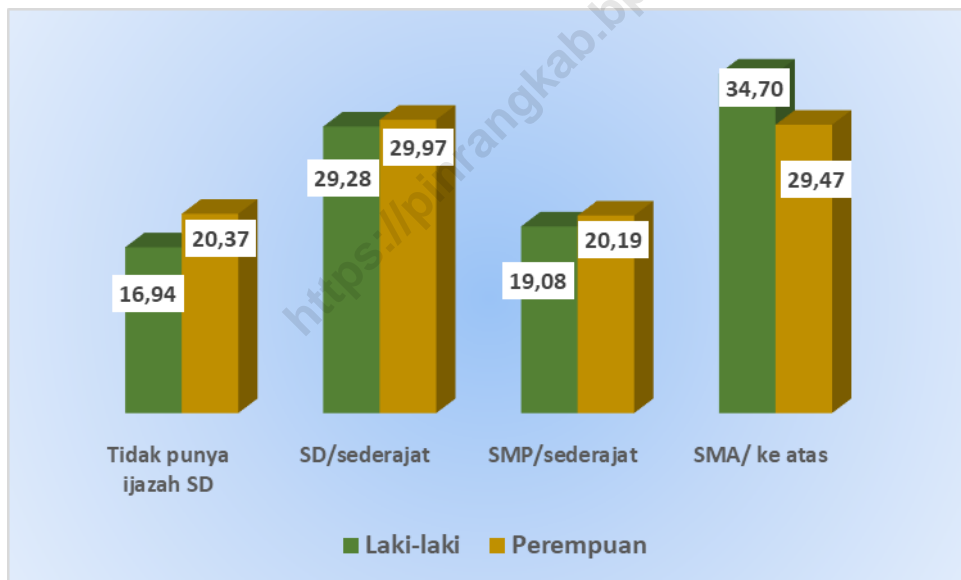
Tingkat Pendidikan

Salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin bagus kualitas sumber daya manusianya. Sehingga

potensi sumber daya manusia dapat dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Tingkat pendidikan yang tinggi secara tidak langsung berpengaruh pada mata rantai tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan pendidikan yang tinggi, keterampilan/keahlian semakin meningkat dan akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Hal ini disinyalir dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Menurunnya tingkat kemiskinan dan meningkatnya penghasilan tentu akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.

Peningkatan pendidikan haruslah dipandang sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan. Pemerintah perlu memikirkan strategi khusus bidang pendidikan agar lebih baik. Kebijakan dan memberi bekal dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Maka disinilah letak peran penting pendidikan yang sesungguhnya.



Grafik 8. Persentase ijazah yang dimiliki penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenis kelamin, 2019

Persentase laki-laki yang bersekolah lebih banyak dibandingkan perempuan. Hal ini terlihat dari persentase penduduk yang tidak memiliki ijazah SD untuk perempuan 20,37 persen sedangkan laki-laki 16,94 persen. Selain itu, laki-laki yang memiliki ijazah tertinggi SMK/MAK juga lebih besar

dari perempuan karena laki-laki memiliki orientasi untuk cepat bekerja setelah lulus sekolah menengah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Indikator tingkat partisipasi sekolah merupakan indikator yang menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan. Dalam publikasi ini indikator tingkat partisipasi sekolah diukur menggunakan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap usia sekolah. APS digunakan untuk mengetahui besarnya penduduk yang bersekolah pada setiap kelompok usia sekolah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

Angka partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pemerintah berharap agar kedua indikator selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat menunjukkan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai, tanpa melihat jenjang pendidikan apa yang sedang ditempuh. Sejak tahun 2009, pendidikan nonformal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan perannya dalam menentukan APS. Meningkatnya APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

Tabel 8. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin tahun 2019

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Laki-laki + Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
7-12	98,22	100	99,07
13-15	93,85	93,84	93,85
16-18	61,22	74,19	73,25

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pinrang tahun 2019

APS kelompok umur 7-12 sebesar 99,07 persen. Artinya, hampir semua anak usia 7-12 tahun di Pinrang sedang mengikuti pendidikan, sementara pada kelompok umur 13-15 tahun mencapai 93,85 persen yang sedang mengikuti pendidikan. Lain halnya pada kelompok umur 16-18 tahun, APS hanya mencapai 73,25 persen saja. Rendahnya APS pada kelompok umur 16-18 tahun menunjukkan adanya pertimbangan masyarakat untuk bersekolah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ada beberapa kemungkinan yang dapat menjadi pertimbangan tersebut, diantaranya biaya, akses, prioritas, budaya, dan faktor lain.

Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator selain APS yang dapat dikatakan lebih halus dalam perhitungannya. Jika APS tidak memperhitungkan jenjang pendidikan apa yang sedang ditempuh oleh anak usia sekolah, APM ini hanya memasukkan anak yang sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan umurnya. APM SD untuk anak usia 7-12

tahun yang sedang sekolah di jenjang SD, APM SMP untuk anak usia 13-15 tahun yang sedang sekolah di jenjang SMP, dan APM SMA/ SMK untuk usia 16-18 tahun yang sedang sekolah di jenjang SMA/SMK. Sehingga APM akan lebih rendah daripada APS.

Menurut definisi, Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, pendidikan nonformal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan. Tujuan dari perhitungan APM adalah untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang ditempuh.



Grafik 9. Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, dan SMA menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang, 2019

Jika melihat APM di Kabupaten Pinrang tahun 2019, APM terendah terdapat pada jenjang SMA baik untuk jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. APM laki-laki untuk jenjang SMA memiliki nilai terendah yaitu 54,65 persen. APM tertinggi terdapat pada jenjang SD untuk perempuan yaitu sebesar 100 persen.

Rasio Siswa, Guru, dan Sekolah

Rasio siswa dengan guru adalah jumlah siswa dibandingkan dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio siswa dengan guru dapat memberikan gambaran mengenai besarnya beban kerja guru dalam mengajar. Rasio siswa dengan guru digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah siswa yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu. Semakin tinggi rasio siswa dengan guru berarti semakin besar beban guru dalam mengawasi siswa sehingga akan semakin besar siswa yang kurang perhatian dari gurunya. Semakin banyak siswa yang menjadi tanggungan guru akan mengurangi efektivitas dan efisiensi dalam pengajaran. Sebaliknya, semakin kecil rasio siswa dengan guru memungkinkan adanya efektivitas dan efisiensi dalam pengajaran. Siswa lebih banyak mendapat perhatian dari guru, begitu juga guru menjadi lebih ringan bebannya dalam melakukan pengawasan dan pengajaran kepada siswa.

Tabel 9. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pinrang Tahun 2019

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah			Jumlah Guru	Jumlah Murid
	Negeri	Swasta	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD	315	8	323	3024	40969
MI	1	28	29	165	2950
SMP	52	5	57	1373	16448
MTS	1	23	24	123	2960
SMA	11	4	15	441	7828
MA	1	7	8	96	1148
SMK	10	6	16	531	7802
SLB	1	0	1	14	41
Total	392	81	473	5767	80146

Sumber : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (<https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/>, data semester genap 2018/2019),

Kementrian Agama (<http://emispendis.kemenag.go.id/>, data semester genap 2018/2019)

Di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019, rasio siswa dengan guru untuk jenjang SD sebesar 13,55; MI sebesar 17,88; SMP sebesar 11,98; MTS sebesar 24,07; SMA sebesar 17,75; MA sebesar 11,96; SMK sebesar 14,69; dan SLB sebesar 2,93. Artinya pada jenjang SD satu orang guru memiliki tanggungan mendidik siswa sebanyak 13-14 orang. Begitu juga untuk jenjang selanjutnya. Untuk SLB memiliki rasio siswa dengan guru paling kecil dikarenakan siswa lebih membutuhkan banyak bantuan dari guru dibandingkan jenjang pendidikan lainnya.

Rasio guru dengan sekolah pada setiap jenjang pendidikan diperoleh dengan membandingkan jumlah guru dengan sekolah. Rasio ini berguna

untuk mengetahui berapa rata-rata jumlah guru pada setiap sekolah pada suatu daerah tertentu. Di Kabupaten Pinrang rasio guru dengan sekolah untuk jenjang SD rata-rata memiliki 9-10 orang guru sedangkan untuk MI rata-rata memiliki 5-6 orang guru. Pada jenjang SMP memiliki 24-25 guru, MTs memiliki 5-6 guru, SMA memiliki 29-30 guru, MA memiliki 12-13 orang guru, SMK memiliki 33-34 guru, dan SLB memiliki 14-15 guru. Rasio guru dengan sekolah terkecil adalah pada jenjang MI dan MTS dan terbesar adalah pada jenjang SMK. Jenjang SMA dan SMK memiliki rasio yang tinggi dikarenakan mata pelajaran yang mulai terspesialisasi sehingga dibutuhkan guru yang sesuai dengan keahliannya.

Secara umum rasio siswa dengan guru tidak berbeda jauh untuk setiap jenjang terkecuali SLB. Rasio guru dengan sekolah terlihat adanya jaminan bahwa proses belajar mengajar tetap bisa berjalan baik, setidaknya tidak terhambat oleh kekurangan guru. Namun perlu diingat apabila dilihat dari nilai APS dan APM masih terdapat anak usia sekolah yang belum bersekolah sehingga perlunya dorongan dari berbagai pihak termasuk pemerintah untuk meminimalkan anak tidak sekolah. Peningkatan kompetensi guru juga harus diperhatikan mengingat zaman yang berkembang semakin cepat dan juga demi terjaminnya masa depan siswa.

KETENAGAKERJAAN

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

3,11 %

NOW HIRING

EXECUTIVE ASSISTANT

Report directly to the General Manager of the branch
Receive calls, take messages, and record correspondence
Handle inquiries and requests
Arrange meetings and take minutes
Produce reports and organise data

*Those interested may email their resumes to Cecelia Halbert at
careers@desktopinfinitypaper.co and add JOB: ASSISTANT to your email subject.*

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

58,20 %



dari setiap 100 penduduk usia kerja terdapat sekitar 58 sampai 59 orang yang termasuk angkatan kerja

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://pinrangkab.bps.go.id>

KETENAGAKERJAAN

Salah satu isu penting dalam ketenagakerjaan, di samping keadaan angkatan kerja (economically active population) dan struktur ketenagakerjaan adalah isu pengangguran. Dari sisi ekonomi, pengangguran muncul sebagai akibat kesenjangan antara SDM dengan SDA dan ketersediaan lapangan kerja. Jumlah tenaga kerja semakin meningkat seiring pertumbuhan penduduk sedangkan lapangan kerja yang tersedia terbatas, akibatnya pengangguran semakin meningkat. Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah di bidang ekonomi melainkan juga di bidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial.

Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin dengan menitikberatkan pada masalah perluasan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang terus bertambah. Dengan demikian pemerintah perlu strategi pembangunan yang berorientasi pada perluasan/pembukaan kesempatan kerja. Kemudian sejauh mana pemerintah mengambil strategi seperti itu dan menjalankannya seefektif mungkin, telah dianggap sebagai salah satu batu ujian yang penting artinya bagi keberhasilan pembangunan.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pada suatu kelompok masyarakat, sebagian besar dari mereka, utamanya yang telah memasuki usia kerja, diharapkan terlibat di lapangan kerja tertentu atau aktif dalam kegiatan perekonomian.

Untuk mengatasi persoalan pengangguran, pemerintah harus menyediakan lapangan kerja sesuai pertumbuhan angkatan kerja dengan mendorong pertumbuhan industri yang banyak menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas SDM agar memenuhi kebutuhan industri, serta mendorong masyarakat memiliki jiwa entrepreneurship sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang yang termasuk dalam usia kerja pada Bulan Agustus 2019 sebanyak 268.261 orang. Dari jumlah tersebut,

yang tergolong dalam angkatan kerja sejumlah 156.117 orang yang terdiri dari 151.266 orang penduduk yang bekerja dan 4.851 orang penduduk yang menganggur. Jumlah orang yang bekerja mengalami penurunan sebesar 0,66 persen dari tahun sebelumnya, sementara itu jumlah orang yang menganggur meningkat sebesar 1,70 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel 10. Penduduk Usia 15 tahun ke atas menurut Kegiatan Utama di Kabupaten Pinrang

Kegiatan Utama	2017	2018	2019
Penduduk Usia Kerja (orang)	262.913	265.562	268.261
Angkatan Kerja (orang)	153.422	157.047	156.117
Bekerja (orang)	146.653	152.277	151.266
Menganggur (orang)	6.769	4.770	4.851
TPT (%)	4,41	3,04	3,11
TPAK (%)	58,35	59,14	58,20

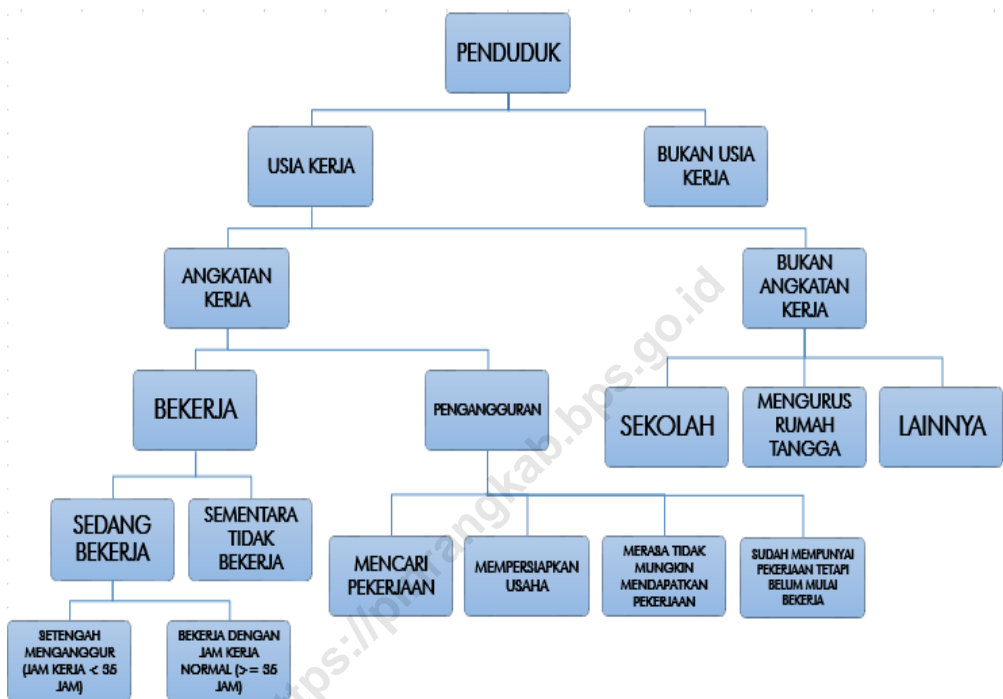
Sumber : Sakernas Agustus, 2017-2019

Konsep Ketenagakerjaan

Konsep dalam bidang ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS membagi penduduk menjadi dua kelompok besar yaitu penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja meliputi penduduk yang bekerja dan pengangguran. Termasuk dalam kelompok bekerja adalah penduduk usia kerja yang statusnya bekerja, dan sementara tidak bekerja (karena menunggu panen, sedang cuti atau sedang menunggu pekerjaan berikutnya).

Menurut jam kerjanya, penduduk bekerja dibedakan menjadi penduduk yang bekerja sesuai jam kerja normal yaitu minimal 35 jam per minggu dan mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, atau disebut setengah menganggur. Penduduk yang termasuk dalam kelompok pengangguran adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi

sedang mencari pekerjaan ataupun mempersiapkan suatu usaha. Termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah kelompok usia 15 tahun ke atas yang kegiatan utamanya adalah bersekolah atau mengurus rumah tangga. Lebih jelasnya klasifikasi penduduk dalam konsep ketenagakerjaan dijelaskan dalam diagram berikut.



Grafik 10. Diagram Ketenagakerjaan, BPS

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator penting ketenagakerjaan yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi tenaga yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase angkatan kerja terhadap seluruh penduduk usia kerja (15 tahun keatas). TPAK adalah salah satu ukuran yang dapat menggambarkan partisipasi penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan

ekonomi. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang maupun jasa dalam suatu perekonomian.

Tabel 11. TPAK Kabupaten Pinrang menurut wilayah dan jenis kelamin tahun 2017-2019

Klasifikasi		2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin	Laki-Laki	80,26	78,54	80,59
	Perempuan	38,54	41,55	37,88
Wilayah	Perkotaan	60,01	60,07	61,92
	Perdesaan	57,65	58,72	56,47
Pinrang		58,35	59,14	58,20

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Sulawesi Selatan tahun 2019

Penduduk usia kerja di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebanyak 58,20 persen adalah angkatan kerja, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 41,80 persen bukan termasuk angkatan kerja. Dari keseluruhan bukan angkatan kerja, terdapat sebanyak 72,02 persennya adalah penduduk yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga, sementara yang bersekolah terdapat sebanyak 17,73 persen dan lainnya sebanyak 10,25 persen. Lainnya disini termasuk yang berada dalam usia kerja tetapi tidak dapat bekerja karena cacat dan lain sebagainya.

TPAK Kabupaten Pinrang tahun 2019 adalah 58,20 persen, artinya dari setiap 100 penduduk usia kerja terdapat sekitar 58 sampai 59 orang yang termasuk angkatan kerja. Angka ini menurun 0,94 persen poin dibandingkan tahun 2018 (59,14 persen). Sementara itu, menurut jenis kelaminnya, TPAK laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan untuk setiap tahun antara 2017-2018. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar laki-laki usia 15 tahun ke atas aktif secara ekonomi dengan bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Sebaliknya, perempuan lebih banyak yang termasuk dalam bukan angkatan kerja karena menjadi ibu rumah tangga.

Berdasarkan klasifikasi wilayahnya, TPAK di Kabupaten Pinrang tahun 2019 untuk daerah perkotaan lebih tinggi (61,92 persen) dibandingkan TPAK

perdesaan (56,47 persen). Hal ini sejalan dengan kondisi tahun 2017 dan 2018, di mana TPAK wilayah perkotaan lebih tinggi dari wilayah perdesaan. TPAK untuk wilayah perkotaan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 60,07 persen pada tahun 2018 menjadi 61,92 persen pada tahun 2019. TPAK pada wilayah perdesaan mengalami penurunan dari 58,72 persen pada tahun 2018 menjadi 56,47 persen pada tahun 2019.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT mengukur penduduk usia kerja yang tidak bisa terserap dalam pasar kerja. Naik turunnya TPT dapat dijadikan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun dan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dari seluruh penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2019, sebesar 41,80 persen termasuk bukan angkatan kerja yaitu penduduk yang berstatus sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Dari 58,20 persen angkatan kerja, sebesar 96,89 persen adalah penduduk yang bekerja sedangkan 3,11 persen merupakan pengangguran. Penduduk yang bekerja meliputi penduduk yang sedang bekerja dan sementara tidak bekerja. Sementara itu, penduduk yang menganggur meliputi pengangguran pernah bekerja dan pengangguran tidak pernah bekerja.

Angka 3,11 persen merupakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang berarti bahwa pada tahun 2019 dari 100 penduduk 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja di Kabupaten Pinrang, sebanyak 3 sampai 4 orang merupakan pengangguran. Dengan kata lain, terdapat 3,11 persen angkatan kerja di Kabupaten Pinrang yang tidak terserap dipasar kerja. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 0,07 persen poin. Fenomena ini menyiratkan adanya sedikit penurunan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019.

Tabel 12. TPT Kabupaten Pinrang Menurut Wilayah, Jenis Kelamin, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2017-2019

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Tahun		
	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
SD ke bawah	1,55	0,81	2,42
SMP	2,38	1,83	1,41
SMA	9,78	4,72	3,86
SMK	10,22	6,80	6,81
Diploma I/II/III/Akademi	15,35	15,25	5,02
Universitas	5,49	6,24	4,05
Jumlah	4,41	3,04	3,11

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Sulawesi Selatan tahun 2019, diolah

Setiap orang selalu berharap dirinya akan mudah mendapatkan pekerjaan layak yang sesuai dengan keahlian yang dia miliki serta tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin besar peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya. Tetapi karena terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia untuk yang berpendidikan tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Selain itu sebagian besar dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ditamatkan. Sehingga sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi pengangguran.

Pada tahun 2018, TPT tertinggi berada pada angkatan kerja lulusan Diploma yaitu sebesar 15,25 persen. Pada tahun 2019 terjadi pergeseran, TPT tertinggi diduduki oleh lulusan SMK dengan TPT sebesar 6,81 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada angkatan kerja lulusan SMK belum terserap secara baik dipasar tenaga kerja karena dianggap belum “cukup” memiliki disiplin keilmuan sehingga kebanyakan lapangan pekerjaan lebih mensyaratkan lulusan pendidikan tinggi untuk pekerjaan profesional. Jika melihat dari sisi tenaga kerjanya, semakin tinggi tingkat pendidikan

seseorang maka mereka lebih selektif dalam memilih jenis pekerjaan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka dan tergolong bukan pekerjaan yang kasar. Sementara dilain pihak, banyak usaha yang harus melakukan efisiensi sebagai pengaruh dari kenaikan biaya produksi akibat inflasi. Sejumlah perusahaan melakukan efisiensi melalui penundaan perekrutan tenaga kerja sampai kondisi perekonomian stabil kembali. Ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai menyebabkan kenaikan pengangguran.

Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Konsep bekerja yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh BPS adalah bekerja minimal satu jam berturut-turut selama seminggu terakhir. Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 adalah 151.266 jiwa. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 1.011 jiwa jika dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu 152.227 jiwa.

Tabel 13. Persentase Penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan usaha, jenis kelamin, dan wilayah, 2019

Klasifikasi		Pertanian	Manufaktur	Jasa
(1)		(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin	Laki-Laki	31,90	12,86	20,89
	Perempuan	4,46	4,74	25,15
Wilayah	Perkotaan	6,29	6,39	20,57
	Perdesaan	30,07	11,21	25,47
Pinrang		36,36	17,60	46,04

Sumber : Sakernas Agustus 2019

Distribusi penduduk yang bekerja menurut sektor utama yaitu pertanian, manufaktur, dan jasa. Pada tahun 2019 penduduk Kabupaten Pinrang yang bekerja di Sektor Pertanian sebesar 36,36 persen, bekerja di Sektor Manufaktur sebesar 17,60 persen, dan yang bekerja di sektor Jasa

sebesar 46,05 persen. Secara wilayah, untuk di perkotaan paling banyak penduduk bekerja di sektor jasa yaitu sebesar 20,57 persen. Sektor jasa meliputi perdagangan, akomodasi, rumah makan/restoran, jasa angkutan, usaha sewa, dan lain sebagainya. Untuk di wilayah perdesaan paling banyak penduduk bekerja di sektor pertanian yaitu sebesar 30,07 persen.

Apabila dilihat dari jenis kelamin, secara umum penduduk laki-laki yang bekerja lebih banyak daripada penduduk perempuan. Di sektor pertanian dan manufaktur, jumlah penduduk laki-laki yang bekerja lebih banyak dari penduduk perempuan yaitu masing-masing sebesar 31,90 dan 12,86 persen, sedangkan penduduk perempuan di sektor pertanian dan manufaktur masing-masing adalah sebesar 4,46 dan 4,74 persen. Untuk sektor jasa, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang bekerja tidak terlalu berbeda jauh yaitu laki-laki sebesar 20,89 persen dan perempuan sebesar 25,15 persen.

Mengenai status pekerjaan, pada tahun 2019 jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai masih paling besar dibandingkan status pekerjaan yang lain. Penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan adalah sebesar 33,01 persen atau sekitar 49.940 orang, mengalami peningkatan dari tahun 2018 yaitu sebesar 29,19 persen atau sekitar 44.435 orang.

Tabel 14. Persentase Penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, wilayah, dan jenis kelamin

Status Pekerjaan	Jenis Kelamin		Wilayah		Pinrang
	Laki-Laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Berusaha Sendiri	20,66	6,86	7,73	19,79	27,52
Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap	13,44	8,36	6,15	15,66	21,80
Berusaha dibantu Buruh Tetap/Dibayar	3,48	0,47	1,86	2,09	3,95
Buruh/ Karyawan/ Pegawai	21,32	11,69	13,51	19,50	33,01
Pekerja Bebas Pertanian	0,61	0,09	0,11	0,58	0,69
Pekerja Bebas Non Pertanian	2,15	0,23	0,94	1,43	2,37
Pekerja Keluarga/ Tidak Dibayar	3,99	6,65	2,96	7,69	10,64

Sumber: Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan 2019, diolah

Selanjutnya, status pekerjaan utama yang memiliki persentase terbesar kedua adalah penduduk bekerja yang berstatus berusaha sendiri mencapai 27,52 persen Pada tahun 2019 atau sekitar 41.626 orang. Penduduk yang bekerja dengan status sebagai pekerja bebas pertanian paling sedikit persentasenya yaitu sebesar 0,69 persen atau sekitar 1.051 orang.

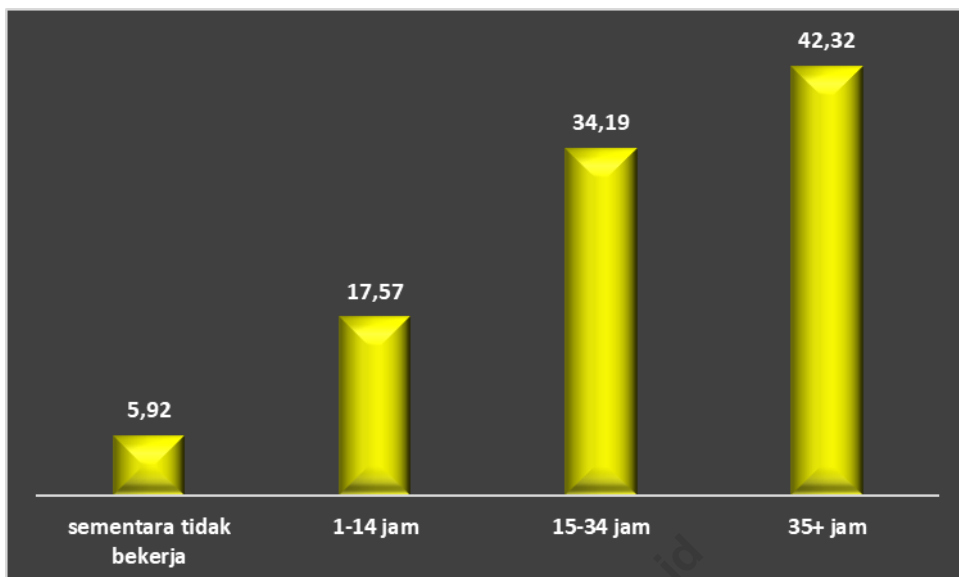
Secara persentase, dalam kurun waktu 2017-2019 terjadi fluktuasi jumlah pekerja pada status pekerjaan utama. Jika dilihat dari sisi penciptaan

lapangan usaha sendiri, cukup banyak pekerja yang mampu menciptakan lapangan usaha sendiri, yang terdiri dari pengusaha yang berusaha sendiri, dibantu buruh tidak tetap, dan dibantu buruh tetap, yaitu mencapai 53,27 persen atau menempati porsi terbesar dari seluruh pekerja. Besarnya persentase jumlah tenaga kerja dengan status pekerjaan utama adalah berusaha menunjukkan bahwa pekerja di Kabupaten Pinrang tidak hanya terpaku pada pekerjaan sebagai buruh/karyawan/pegawai tetapi sebagian besar pekerja memiliki keinginan untuk memiliki usaha sendiri bahkan hingga menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain.

Secara sederhana kegiatan formal dan informal diidentifikasi menurut status pekerjaan. Pekerja informal terdiri dari penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian dan pekerja keluarga/tak dibayar. Selebihnya merupakan pekerja formal.

Jumlah Jam Kerja

Terkait dengan jumlah jam kerja yang dihabiskan selama seminggu, dapat diperoleh indikator pengangguran terselubung atau setengah pengangguran yaitu bagian dari angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Proporsi jumlah penduduk setengah pengangguran bermanfaat untuk dijadikan acuan pemerintah dalam rangka meningkatkan tingkat utilisasi, kegunaan, dan produktivitas pekerja. Semakin tinggi tingkat setengah pengangguran maka semakin rendah tingkat utilisasi pekerja dan produktivitasnya. Akibatnya, pendapatan mereka pun rendah dan tidak ada jaminan sosial atas mereka. Hal ini sering terjadi di sektor informal yang rentan terhadap kelangsungan pekerja, pendapatan dan tidak tersedianya jaminan sosial. Sehingga pemerintah perlu membuat kebijakan untuk meningkatkan kemampuan bekerja mereka, misalnya menambah balai latihan kerja.



Grafik 11. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut jumlah jam kerja selama seminggu, 2019

Menurut jumlah jam kerja selama seminggu, diketahui bahwa 42,32 persen pekerja di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 bekerja 35 jam atau lebih, sebanyak 34,19 persen bekerja antara 15 sampai 34 jam, 17,57 persen bekerja 1 sampai 14 jam, dan sisanya 5,92 persen sementara tidak bekerja selama seminggu yang lalu. Dengan demikian tingkat pengangguran terselubung (terlihat bekerja akan tetapi jam kerjanya sangat kecil yaitu kurang dari 35 jam per minggu) di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 adalah 57,68 persen. Tingkat pengangguran terselubung yang cukup tinggi ini kemungkinan dipengaruhi oleh tingginya pekerja keluarga dan pekerja bebas.

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://pinrangkab.bps.go.id>

TARAF DAN POLA KONSUMSI

**Rata-Rata Pengeluaran Perkapita untuk
Makanan dan Bukan Makanan dalam
Sebulan**



Rp 471.396

Rp 432.471



**Rata-Rata Konsumsi Kalori
Perkapita Sehari : 2050,89 kkal**

**Rata-Rata Konsumsi Protein
Perkapita Sehari : 63,27 gram**

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://pinrangkab.bps.go.id>

TARAF DAN POLA KONSUMSI

Taraf dan pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu dari sekian indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan dibanding non makanan, mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga.

Pengeluaran Rumah Tangga

Jenis pengeluaran rumah tangga dibedakan menjadi kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluarannya. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini terlihat pada kelompok penduduk dengan tingkat konsumsi makanannya yang mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau untuk ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.



Grafik 12. Persentase rata-rata pengeluaran perkapita dalam sebulan untuk makanan dan non makanan penduduk Kabupaten Pinrang tahun 2016-2019

Persentase konsumsi makanan terhadap total pengeluaran pada periode 2016-2017 menunjukkan kecenderungan meningkat namun menurun Pada tahun 2018 dan mengalami sedikit peningkatan Pada tahun 2019. Sebaliknya, untuk persentase konsumsi non makanan cenderung menurun dari tahun 2016 ke 2017 namun meningkat Pada tahun 2018 dan 2019. Kondisi tahun 2019 ini menunjukkan ada banyak perubahan pola konsumsi dari komoditi non makanan ke makanan. Akan tetapi persentase konsumsi non makanan yang masih cukup besar merupakan indikasi adanya peningkatan kesejahteraan.

Pada tahun 2019, rata-rata konsumsi perkapita sebulan rumah tangga di Kabupaten Pinrang adalah Rp 903.867,-. Angka ini lebih kecil apabila dibandingkan dengan tahun 2018, yaitu Rp 904.833,-. Jika dihitung maka rata-rata konsumsi makanan per-kapita sebulan rumah tangga di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 471.396,- atau 52,15 persen dari total pengeluaran. Mengalami peningkatan 0,04 persen dibandingkan tahun 2018. Sebaliknya, persentase pengeluaran non makanan menunjukkan sedikit penurunan dari 47,89 persen Pada tahun

2018 menjadi 47,85 persen Pada tahun 2019 atau sekitar Rp 432.471 dari total pengeluaran rumah tangga.

Tabel 15. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan (rupiah) menurut kelompok barang dan daerah tempat tinggal, Maret 2019

Kelompok Barang		Rata-Rata Pengeluaran Sebulan (Rp)
(1)		(2)
A.	MAKANAN	
1	Padi-Padian	58.468
2	Umbi-Umbian	1.505
3	Ikan/Udang/Cumi/Kerang	60.840
4	Daging	6.949
5	Telur dan Susu	21.574
6	Sayur-Sayuran	19.552
7	Kacang-Kacangan	5.538
8	Buah-Buahan	27.850
9	Minyak dan Kelapa	8.786
10	Bahan Minuman	12.784
11	Bumbu-Bumbuan	7.338
12	Konsumsi Lainnya	8.566
13	Makanan dan Minuman Jadi	16.0571
14	Rokok	71.075
Jumlah Makanan		471.396
B.	BUKAN MAKANAN	
1	Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	189.311
2	Aneka Barang dan Jasa	87.455
3	Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	37.480
4	Barang Tahan Lama	68.492

5	Pajak Pungutan, dan Asuransi	33.758
6	Keperluan Pesta dan Upacara	15.975
Jumlah Bukan Makanan		432.471
Jumlah		903.867

Sumber : Susenas Maret, 2019

Konsumsi Energi dan Protein

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah kalori dan protein yang dikonsumsi dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2012), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kkal dan 57 gram protein.

Pada tahun 2019 (periode Maret) rata-rata konsumsi energi perhari penduduk Kabupaten Pinrang sebesar 2.050,89 kkal dan rata-rata kecukupan konsumsi protein penduduk Kabupaten Pinrang adalah 63,27 gram. Kabupaten Pinrang dalam konsumsi energi belum mencapai standar rata-rata kecukupan energi namun untuk konsumsi protein telah berada di atas standar rata-rata kecukupan yang telah ditetapkan pemerintah.

Tabel 16. Rata-rata konsumsi energi dan protein perkapita sehari menurut komoditi makanan, Maret 2019

Komoditi Makanan	Energi (kkal)	Protein (gram)
(1)	(2)	(3)
Padi-Padian	910,41	21,47
Umbi-Umbian	12,68	0,11
Ikan	105,92	16,91
Daging	33,44	2,03
Telur Dan Susu	43,94	2,31
Sayur-Sayuran	24,60	1,57
Kacang-Kacangan	34,62	3,43
Buah-Buahan	69,40	0,90
Minyak Dan Kelapa	185,50	0,23
Bahan Minuman	81,03	0,50
Bumbu-Bumbuan	4,88	0,20
Bahan Makanan Lainnya	53,37	1,18
Makanan Minuman Jadi	491,10	12,43
Rokok Dan Tembakau	0,00	0,00
Total Makanan	2050,89	63,27

Sumber: Susenas Maret 2019

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://pinrangkab.bps.go.id>

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN



Penduduk yang menempati bangunan rumah dengan status kepemilikan MILIK SENDIRI sebesar : **89,49%**

83,70% Penduduk menggunakan fasilitas buang air besar yang digunakan oleh rumah tangga itu sendiri, dengan **99,84%** jenis kloset adalah kloset leher angsa.



77,99% Rumah Tangga menggunakan sumur bor/pompa sebagai sumber air utama untuk mandi/cuci/dll.

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://pinrangkab.bps.go.id>

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia selain sandang, pangan, dan kesehatan. Pentingnya rumah dapat dilihat dari fungsinya sebagai tempat tinggal, tempat istirahat, tempat berlindung dari hujan dan panas serta tempat berlangsungnya proses sosialisasi bagi semua anggota rumah tangga. Keberadaan rumah dan fasilitasnya dapat mempengaruhi tingkat kesehatan anggota rumah tangga sekaligus menunjukkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Semakin baik rumah dan fasilitas yang dimiliki, dapat diasumsikan semakin baik pula tingkat kesehatan dan tingkat kesejahteraan penghuninya. Bab ini akan menyajikan data dari beberapa aspek mendasar yang merupakan komponen penyusun sebuah rumah yang berkaitan dengan struktur bangunan perumahan dan fasilitas perumahan tersebut.

Rumah berfungsi pula sebagai sarana pengaman dan pemberi ketentraman hidup bagi manusia. Dalam fungsinya sebagai pengaman bukan berarti menutup diri melainkan tetap harus membuka diri dan menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal berpengaruh terhadap status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan (Kepmen Nomor 9 tahun 1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standar minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan

kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material rumah seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Kualitas Rumah Tinggal

Rumah yang berkualitas adalah rumah yang memenuhi syarat tertentu dilihat dari beberapa aspek, seperti luas lantai perkapita, jenis lantai, dinding dan atap yang digunakan. Rumah yang dikategorikan sebagai rumah layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa persyaratan. Diantara persyaratan itu adalah dinding terluas terbuat dari tembok atau kayu, atap dari beton, genteng, sirap, seng ataupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah.

Tabel 17. Persentase rumah tangga beberapa indikator kualitas perumahan 2018-2019

Indikator Kualitas Perumahan	Lantai Bukan Tanah (%)	Atap Beton, Genteng, Sirap, Seng, dan Asbes (%)	Dinding terluas Tembok dan Kayu (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	99,77	99,81	71,22
2019	100	100	78,68

Sumber: Susenas Maret 2018-2019

Dalam publikasi ini dinding layak huni adalah dinding yang berbahan tembok dan kayu serta tidak lembab dan tidak tembus angin. Data tahun

2019 menunjukkan sebesar 78,68 persen penduduk Kabupaten Pinrang sudah tinggal di dalam rumah dengan dinding yang layak. Salah satu fungsi atap adalah untuk melindungi penghuni rumah dari cuaca panas dan hujan. Berdasarkan tabel tersebut pada tahun 2019, seluruh rumah tangga di Kabupaten Pinrang tinggal di dalam rumah yang menggunakan atap layak (beton, genteng, seng, sirap, asbes) sebesar 100,00 persen. Jenis atap seng paling banyak digunakan oleh penduduk Kabupaten Pinrang karena atap jenis ini paling sesuai dengan konstruksi rumah panggung yang berdinding kayu dan juga harga material seng yang lebih terjangkau. Jenis lantai rumah dapat mempengaruhi kondisi kesehatan anggota rumah tangga. Seluruh rumah tangga di Kabupaten Pinrang memiliki jenis lantai terluas bukan tanah yaitu sebanyak 100 persen. Lantai bukan tanah terdiri dari keramik, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, semen/bata merah, bambu, dan lantai lainnya.

Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal dan layak. Yang termasuk dalam kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Ketersediaan fasilitas rumah menentukan kenyamanan penghuninya, tingkat kesehatan, dan kemudahan dalam beraktivitas. Fasilitas yang penting agar rumah menjadi nyaman dan sehat untuk dijadikan tempat tinggal antara lain tersedianya air minum bersih, sumber penerangan listrik, serta memiliki kloset sendiri dengan tangki septik/SPAL.

Salah satu fasilitas yang harus dipenuhi sebagai syarat dari rumah sehat adalah air minum bersih. Sumber air minum yang termasuk kategori air bersih yaitu air ledeng, air hujan, sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Khusus untuk sumur bor/pompa, sumur terlindung,

dan mata air terlindung harus berjarak 10 meter atau lebih dari tempat penampungan tinja/limbah/kotoran terdekat agar dapat dikatakan layak. Pada Tahun 2019 sebagian besar penduduk Kabupaten Pinrang 42,87 persen telah menggunakan sumber air minum bersih.

Tabel 18. Persentase Rumah Tangga menurut beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Pinrang 2018-2019

Fasilitas	2018	2019
Air Minum Bersih*	35,63	42,87
Jamban Sendiri	79,33	83,70
Sumber Penerangan Listrik	100	99,73

*Air Minum Bersih : air kemasan, ledeng, sumber air terlindungi dengan syarat jarak tempat penampungan terdekat > 10m

Sumber: Susenas Maret 2018-2019

Kualitas air bersih dapat dilihat dari sumbernya. Sumber air minum menurut derajat kualitasnya berturut-turut adalah air kemasan/isi ulang, bor/pompa, ledeng, sumur (sumur terlindung dan sumur tak terlindung), mata air terlindung, air sungai dan dan air hujan. Untuk rumah tangga yang menggunakan sumber air minum dari pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, mata air tak terlindung harus memperhatikan jarak, dari tempat pembuangan akhir tinja. Jarak yang terbaik adalah minimal 10 meter dari tempat pembuangan tinja. Persentase terbesar sumber air untuk minum yang dipakai oleh penduduk di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 adalah air dari sumur bor/pompa sebesar 42,87 persen.

Sumber penerangan yang dapat digunakan sebagai fasilitas penerangan diantaranya listrik (PLN dan non PLN), petromak, aladin, pelita, sentir, obor dan lainnya. Listrik merupakan sarana yang cukup penting untuk rumah tangga yaitu sebagai sumber penerangan dan merupakan kebutuhan penting masyarakat. Sumber penerangan di Kabupaten Pinrang terdiri atas 99,73 persen listrik yang terdiri dari listrik PLN dengan meteran, listrik PLN tanpa meteran, dan listrik non PLN. Masih ada 0,27 persen penduduk yang sumber penerangannya bukan listrik. Listrik non PLN

umumnya digunakan oleh rumah tangga di daerah yang memiliki akses terbatas seperti beberapa desa di Kecamatan Lembang. Listrik non PLN umumnya bersumber dari swadaya masyarakat atau bantuan lembaga internasional. Sumber tenaga listrik non PLN di Kabupaten Pinrang adalah kincir air. Beberapa wilayah di Kabupaten Pinrang yang tergolong daerah sulit memang belum terjangkau listrik. Sehingga untuk kehidupannya mereka masih menggunakan penerangan tradisional.

Sistem pembuangan tinja erat kaitannya dengan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kebersihan rumah tangga. Sistem pembuangan tinja sangat mempengaruhi kualitas lingkungan di sekitar tempat tinggal rumah tangga tersebut. Kriteria akses terhadap sanitasi layak adalah penggunaan fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) milik sendiri atau bersama, menggunakan kloset dan tempat pembuangan akhir tinjanya berupa tangki septik atau sarana pembuangan air limbah (SPAL).

Berdasarkan data Susenas, 83,70 persen penduduk Kabupaten Pinrang memiliki fasilitas BAB sendiri, sedangkan sisanya 16,30 persen tidak memiliki fasilitas BAB. Dari 83,70 persen tersebut sebesar 99,84 persen penduduk menggunakan jenis kloset leher angsa Kloset Leher Angsa merupakan kloset leher lubang closet berbentuk lengkungan, dengan demikian akan terisi air, gunanya sebagai sumbat sehingga dapat mencegah bau busuk serta masuknya binatang-binatang kecil. Sisanya yaitu sebesar 0,16 persen menggunakan jenis kloset plengsengan dan kloset cemplung/cubluk. Dengan kata lain penggunaan fasilitas pembuangan air besar di Kabupaten Pinrang Tahun 2019 sebagian besar menggunakan jenis kloset yang sehat.

Tempat pembuangan akhir tinja yang digunakan sebagian besar rumah tangga yaitu 99,38 persen telah menggunakan tangki septik/IPAL dengan dasar semen. Sementara itu, sisanya sebesar 0,62 persen rumah tangga masih belum memiliki pembuangan akhir tinja yang layak. Pembuangan selain tangki septik/IPAL yang digunakan penduduk Kabupaten Pinrang antara lain kolam/sawah/sungai/laut, lubang tanah, pantai/tanah lapang/kebun, dan lain sebagainya. Dampak serius membuang kotoran yang tidak sehat menyebabkan pencemaran tanah, air dan udara sehingga mempengaruhi kualitas lingkungan dan pada akhirnya mempengaruhi kesehatan anggota rumah tangga.

Status Kepemilikan Rumah

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat mempengaruhi status kepemilikan tempat tinggal. Status kepemilikan rumah menurut data susenas dikelompokkan menjadi lima macam yaitu milik sendiri, sewa/kontrak, bebas sewa, dinas dan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah tinggal milik sendiri dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.



Grafik 13. Status kepemilikan rumah

Sebagian besar penduduk Kabupaten Pinrang telah memiliki rumah dengan status milik sendiri yaitu sebanyak 89,49 persen. Sisanya sebesar 10,51 persen merupakan rumah dengan status kepemilikan kontrak/sewa, bebas sewa milik orang lain, rumah dinas, dan lainnya.

KEMISKINAN



Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Pinrang, Maret 2019

31.850 Jiwa

8,46%

P1

1,54

P2

0,40

Garis
Kemiskinan :

294.349

Rupiah/Kapita/Bulan

Periode Maret 2019

P1 = Indeks Kedalaman Kemiskinan

Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan

P2 : Indeks Keparahan Kemiskinan

Ukuran yang dapat memberi gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://pinrangkab.bps.go.id>

KEMISKINAN

Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Salah satu upaya yang dilaksanakan dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan melakukan pembangunan di bidang ekonomi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan akan memberikan kesejahteraan kepada semua lapisan masyarakat di wilayah tersebut. Namun terkadang, pertumbuhan ekonomi yang terjadi kurang dapat terdistribusi dengan merata sehingga belum mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat bahkan menyisakan masalah kemiskinan untuk sebagian masyarakat karena kurangnya kemampuan dalam mengakses baik sumber daya dan faktor produksi yang tersedia maupun hasil yang telah dicapai dalam pembangunan ekonomi tersebut.

Masalah kemiskinan merupakan masalah mendasar yang harus diselesaikan oleh pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah. Penanggulangan kemiskinan memerlukan langkah-langkah strategis dan sistemik yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak. Salah satu kebijakan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan program perlindungan sosial. Perlindungan sosial merupakan bagian dari “Nawa Cita” atau Sembilan agenda perubahan yang dicanangkan pemerintah yaitu mengenai peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar warga miskin dan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin. Selain itu berbagai program pembangunan juga diluncurkan untuk penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Agar seseorang dapat dikatakan hidup layak, pemenuhan kebutuhan makanan saja tidak cukup. Oleh karena itu perlu juga dipenuhi kebutuhan dasar bukan makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian serta aneka barang dan jasa lainnya. Batas kebutuhan minimum untuk

makanan ditambah kebutuhan minimum untuk bukan makanan itulah yang disebut dengan Garis Kemiskinan (GK). Singkatnya, garis kemiskinan terdiri dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan. Jika pengeluaran seseorang berada di bawah garis kemiskinan tersebut maka orang tersebut akan dikategorikan miskin.

Menurut Bappenas, miskin adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain: terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Definisi tersebut diterjemahkan dalam konsep kemiskinan makro yang dilakukan oleh BPS sebagai rumah tangga yang pengeluaran perkapita sebulan lebih rendah dibandingkan garis kemiskinan (GK).

Penanganan kemiskinan perlu didukung oleh data yang berkualitas. Hingga saat ini BPS bertugas untuk mengumpulkan data kemiskinan makro dan mikro. Data kemiskinan makro adalah data persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, sementara data kemiskinan mikro adalah data yang menunjukkan nama dan alamat rumah tangga miskin. Data kemiskinan mikro digunakan untuk menentukan sasaran program-program penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, data kemiskinan makro lebih banyak digunakan untuk mengevaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, menentukan target dalam perencanaan pembangunan untuk pengentasan kemiskinan, serta membandingkan kondisi kemiskinan antar waktu dan antar daerah.

Pengukuran kemiskinan makro yang dilakukan oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dengan pendekatan pengeluaran rumah tangga karena data pendapatan yang akurat sulit diperoleh. Pada publikasi ini akan ditampilkan hasil penghitungan kemiskinan makro yang dihasilkan dari data konsumsi/pengeluaran yang dikumpulkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Tabel 19. Garis kemiskinan Kabupaten Pinrang tahun 2014-2019

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
(1)	(2)
2014	228.150
2015	234.897
2016	250.163
2017	256.054
2018	280.746
2019	294.349

Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2020

Garis kemiskinan Kabupaten Pinrang tahun 2019 adalah Rp 294.349,- Terlihat dari Tabel 9 garis kemiskinan cenderung meningkat setiap tahun. Hal ini dipicu oleh kenaikan harga-harga komoditi makanan maupun non makanan di Kabupaten Pinrang sebagai dampak adanya fluktuasi harga BBM, kenaikan harga komoditi dunia, penurunan nilai tukar yang berdampak pada harga barang impor dan sebagainya.

Kenaikan garis kemiskinan pada umumnya akan diikuti peningkatan persentase penduduk miskin terutama jika kenaikan garis kemiskinan terjadi akibat kenaikan harga yang tidak diimbangi oleh kenaikan pendapatan masyarakat. Kondisi pada tahun 2014 hingga 2019 menunjukkan bahwa gejala ekonomi yang terjadi berimbas pada kenaikan kemiskinan karena tidak diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kenaikan garis kemiskinan Pada tahun 2019 mengakibatkan persentase penduduk miskin berkurang. Fenomena ini menunjukkan adanya kenaikan daya beli masyarakat yang diimbangi oleh kenaikan pendapatan sehingga persentase penduduk miskin sedikit berkurang.



Grafik 14. Persentase dan jumlah penduduk miskin Kabupaten Pinrang tahun 2014-2019

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pinrang mengalami penurunan dan peningkatan sejak tahun 2014 hingga 2019. Selama tahun 2014 hingga tahun 2016, persentase penduduk miskin mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan. Sementara itu, pada tahun 2019, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pinrang mengalami penurunan sebesar 0,35 persen yaitu dari 8,81 persen atau 32.940 jiwa menjadi 8,46 persen atau 31.850 jiwa.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Tabel 20. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan Kabupaten Pinrang tahun 2014-2019

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)
(1)	(2)	(3)
2014	1,00	0,17
2015	1,66	0,52
2016	1,30	0,36
2017	1,62	0,44
2018	1,16	0,26
2019	1,54	0,40

Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2019

Pada periode 2018-2019 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat dari 1,16 pada tahun 2018 menjadi 1,54 pada tahun 2019. Demikian pula indeks keparahan kemiskinan, pada tahun 2019 sebesar 0,40, lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 sebesar 0,26. Meningkatnya nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Sosial Lainnya

Penggunaan Telepon Seluler, Tablet, Laptop, PC, dll



84,40%



84,63%



84,19%

Akses Internet

40,10%



42,47%



37,90%



Lebih banyak penduduk laki-laki yang menggunakan HP, Laptop, PC dan akses internet daripada penduduk perempuan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://pinrangkab.bps.go.id>

SOSIAL LAINNYA

Aspek sosial, seperti akses pada teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi indikator yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat. Perkembangan gaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang didapat melalui peralatan komunikasi seperti telepon selular pintar dan komputer. Jenis akses dan media informasi yang beragam tentunya menjadi pilihan bagi masyarakat dalam mengikuti tren gaya hidup modern. Semakin terjangkaunya harga telepon pintar dan semakin luasnya cakupan wilayah jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data internet semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi yang mereka inginkan.

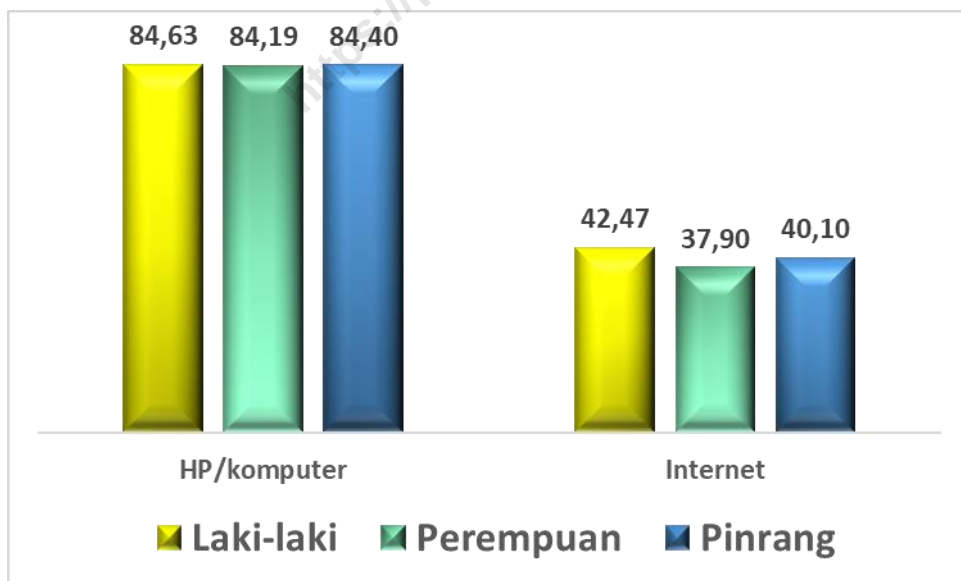
Rasa aman dan adanya perlindungan dari negara terhadap masyarakat dari gangguan dan ancaman kejahatan diperlukan oleh masyarakat agar dapat beraktivitas dan bekerja. Tingkat keamanan wilayah dapat menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan sosial wilayah tersebut. Semakin rendah tingkat kejahatan di suatu wilayah menjadi indikasi semakin nyamannya wilayah tersebut, yang pada ujungnya berafiliasi pada peningkatan kesejahteraan sosial pada wilayah tersebut. Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari akses terhadap pelayanan publik seperti kredit usaha dan pelayanan kesehatan gratis. Semakin besar masyarakat mendapatkan pelayanan kredit usaha semakin mempermudah masyarakat untuk meningkatkan aktivitas usahanya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan telepon seluler cenderung berdampak kepada kepemilikan rumah tangga atas telepon biasa atau telepon rumah. Pesatnya perkembangan teknologi telepon seluler membuat telepon rumah semakin ditinggalkan. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kepemilikan telepon rumah. Penggunaan telepon rumah yang mengharuskan seseorang berada

di posisi tertentu yang terpasang jaringan telepon semakin ditinggalkan masyarakat karena dianggap kurang efisien dalam mendukung mobilitas penggunaannya. Begitu pula dengan penggunaan komputer rumah ataupun laptop pada rumah tangga mulai tergeser keberadaannya dengan semakin maraknya gawai yang lebih praktis mobilitasnya, seperti smartphone.

Internet sebagai salah satu jendela ilmu pengetahuan, merupakan teknologi yang berkembang sangat pesat. Berbagai sektor ekonomi pun telah banyak memanfaatkan teknologi tersebut. Penggunaan internet pun semakin memasyarakat. Penting bagi masyarakat untuk melek internet selain melek huruf. Kemampuan akses internet juga menunjukkan kemajuan pola pikir masyarakat. Banyak hal positif yang bisa dilakukan dengan teknologi satu ini. Pengetahuan, penghasilan, informasi lainnya bisa didapat melalui internet. Perkembangan teknologi dan informasi bergerak sangat cepat, bagi masyarakat yang mengikuti, secara tidak langsung ikut berkembang dalam hal pengetahuan, kemampuan, dan kreatifitas. Namun efek negatif internet pun tetap harus diwaspadai. Banyak hal seperti norma sosial serta budaya yang telah tergerus oleh perkembangan internet, disamping itu secara individu, juga turut mempengaruhi aspek fisik dan psikologis masyarakat.



Grafik 15. Persentase Penduduk usia 5 tahun ke atas yang memiliki telepon seluler/komputer dan pernah mengakses internet, 2019

Dari grafik dapat diketahui bahwa persentase penduduk usia 5 tahun keatas yang memiliki dan menguasai telepon seluler sebesar 84,40 persen dan dari 84,40 persen tersebut 84,63 persen penduduk yang memiliki dan menguasai telepon seluler/komputer adalah laki-laki dan penduduk perempuan sebesar 84,19 persen. Sedangkan penduduk usia 5 tahun keatas yang mengakses internet (termasuk Facebook, Twitter, BBM, dan Wahtasapp) selama 3 bulan terakhir sebesar 40,10 persen. Penduduk laki-laki yang mengakses internet lebih banyak apabila dibandingkan dengan

Tingkat Keamanan

Selain teknologi dan informasi, aspek keamanan di suatu wilayah turut mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Tingginya persentase korban tindak kejahatan mengindikasikan masih kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut sehingga mendorong pelaku untuk melakukan tindak kejahatan. Penduduk yang termasuk dalam korban kejahatan yang dicakup dalam Susenas ini adalah semua bentuk korban kejahatan seperti pencurian, pencurian dengan kekerasan, penganiayaan, pelecehan seksual, atau lainnya kecuali kejahatan kasus pembunuhan karena yang bersangkutan sudah tidak menjadi anggota rumah tangga lagi. Sepanjang tahun 2018 (1 Januari – 31 Desember 2018), sebanyak 0,86 persen penduduk Kabupaten Pinrang mengaku pernah menjadi korban kejahatan selama satu tahun terakhir. Artinya setiap 100 penduduk Kabupaten Pinrang, setidaknya ada 1 orang yang menjadi korban kejahatan. Bila kita kalikan dengan total jumlah penduduk, maka sekitar 3,2 ribu penduduk Kabupaten Pinrang Pada tahun 2018 pernah menjadi korban kejahatan selama setahun terakhir.

Pemberian Kredit Usaha dan Pelayanan Kesehatan Gratis

Selain tingkat keamanan wilayah, bantuan kredit usaha dan pelayanan kesehatan gratis juga dapat digunakan sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat. Aliran dana ke masyarakat berupa kredit usaha yang berdampak kepada pergerakan ekonomi rakyat akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun bentuk pelayanan pemberian kredit usaha kepada masyarakat dapat berasal dari pemerintah, perbankan, lembaga keuangan lainnya maupun perorangan.

Pemberdayaan dalam bentuk pemberian kredit usaha ini akan mendukung peningkatan pendapatan, produktifitas, dan penyediaan lapangan kerja. Beberapa contoh program pemberian kredit usaha dari pemerintah diantaranya KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang diberikan oleh beberapa bank terpilih dan maupun program lain selain KUR. Selain bank, koperasi juga memberikan layanan kredit usaha kepada masyarakat.

Pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakatnya. Bantuan pemerintah dalam kredit usaha ini diharapkan bisa membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya dan akhirnya kesejahteraannya meningkat. Sasaran terhadap UMKM pun diharapkan bisa lebih optimal guna menstimulus perekonomian. Terutama kredit untuk UMKM sektor Pertanian diharapkan dapat lebih optimal, mengingat banyaknya masyarakat yang bekerja di sektor tersebut.

Program Indonesia Pintar (PIP), merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada bidang pendidikan. PIP merupakan bantuan tunai pendidikan untuk anak usia sekolah (usia 6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin. Pada tahun 2019, ada sekitar 8,63 persen rumah tangga di Kabupaten Pinrang yang menerima PIP. Sudah selayaknya bantuan pendidikan yang sangat positif ini dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dengan ikut berpartisipasi dalam dunia pendidikan, untuk peningkatan kualitas pendidikan di masyarakat yang pada ujungnya akan meningkatkan kesejahteraan.

Selain PIP, untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak demi tercapainya kesejahteraan sosial, perlu diperhatikan perlindungan sosial, atau perlindungan terhadap kondisi-kondisi sosial, diantaranya kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran dan kondisi terkait lainnya. Program

pelayanan ini tentunya lebih ditujukan kepada rumah tangga yang tergolong kurang mampu. Adanya jaminan sosial merupakan wujud pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.

Semakin besar jumlah penerima jaminan sosial diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya yang kurang mampu karena alokasi dana yang seharusnya digunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan yang lain.

Tabel 21. Persentase rumah tangga yang mendapatkan program perlindungan sosial dan jaminan sosial Tahun 2019

Jenis Jaminan		Persentase
Perlindungan Sosial	Raskin/Rastra/BPNT	16,74
	PIP	8,63
	KKS	10,26
	PKH	5,86
Jaminan Sosial	Jamninan Hari Tua	8,75
	Asuransi/Pesangon PHK	8,99

Sumber : Susenas Maret 2019

Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah sosial lainnya, utamanya yang tidak tersentuh oleh jaminan sosial adalah pengadaan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Data Susenas Maret 2019 menunjukkan penerima KPS/KKS pada tahun 2019 sekitar 10,26 persen. Fungsi KKS adalah sebagai penanda bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial maupun bantuan pangan non tunai. Tujuannya adalah untuk meringankan beban masyarakat terutama masyarakat miskin, sehingga tercipta kesejahteraan yang merata.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada sektor pangan, pemerintah memberlakukan program beras miskin atau beras kesejahteraan (raskin/rastra) dan juga bantuan pangan non tunai (BPNT), yang telah dilaksanakan sejak tahun 2002. Harga raskin/rastra tergolong sangat murah jika dibandingkan harga beras normal, dengan rata-rata harga

tebus per kilogram hanya sekitar Rp. 1.600. Hingga saat ini persentase rumah tangga yang telah mendapat manfaat program raskin/rastra/ BPNT mencapai 16,74 persen. Sentuhan pemerintah terhadap kebutuhan pangan melalui raskin/rastra/BPNT merupakan salah satu wujud kepedulian terhadap polemik kemiskinan, yang tujuannya untuk penyetaraan kesejahteraan masyarakat.

<https://pinrangkab.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, UNFPA. 2015. Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 2010-2020. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota Tahun 2019. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. 2019. Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan Agustus 2019. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan: Makassar.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. 2019. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Sulawesi Selatan Per Kabupaten/Kota. Badan Pusat Statistik Provinsi sulse: Makassar.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



***BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PINRANG***

Jl. Andi Isa No.18, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan

Telp./Fax : 0421 - 921021

e-mail : bps7315@bps.go.id

homepage : pinrangkab.bps.go.id